

**ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL PADA KEBIJAKAN ANTI-  
IMIGRAN ERA PEMERINTAHAN VIKTOR ORBAN DI HONGARIA**

**TAHUN 2015-2018**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AISYAH ANGGRAINI**

17323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL PADA KEBIJAKAN ANTI-  
IMIGRAN ERA PEMERINTAHAN VIKTOR ORBAN DI HONGARIA**

**TAHUN 2015-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**AISYAH ANGGRAINI**

17323005

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

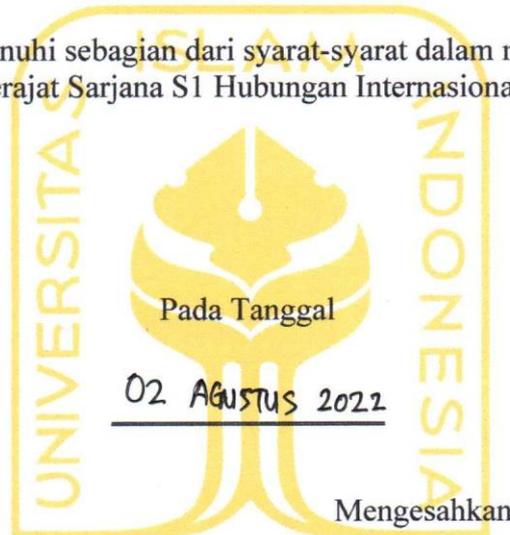
**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL PADA KEBIJAKAN ANTI-  
IMIGRAN ERA PEMERINTAHAN VIKTOR ORBAN DI HONGARIA**

**TAHUN 2015-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji

- 1 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Sc.
- 2 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 3 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R.

Tanda Tangan

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*02 Agustus 2022,*



---

*Aisyah Anggraini*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin

Tulisan penelitian ini saya persembahkan untuk:

### Ayah dan Ibu

Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, nasihat, dan doa yang telah kalian hibahkan selama ini. Terima kasih untuk tetap sehat wal'afiat dan selalu ada disaat suka maupun duka.

### Semua Keluarga Besar

Terima kasih atas nasihat dan doa yang telah diberikan selama ini.

### Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas dukungan, perjuangan, dan kebersamaan selama menempuh kuliah di HI UII

## HALAMAN MOTTO

*“Jika kita bertemu rintangan, yang harus kita lakukan adalah melintasinya.*

*Rintangan itu akan berubah menjadi jembatan”*

**(Dream High)**

*“Yang terpenting, bukanlah seberapa besar mimpi kalian, melainkan seberapa  
besar upaya kalian mewujudkan mimpi itu”*

**(Sang Pemimpi, Andrea Hirata)**

المعهد الإسلامي  
الاستدرا الأندونيسي

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada Penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi Penulis
2. Kepada perempuan paling hebat yang ada dalam hidup saya, Ibunda Wirdaniati, yang selalu menjadi *support system* disaat suka maupun duka, yang menjadi teman, tempat berkeluh kesah, penuh kasih sayang dan yang berkontribusi banyak dalam perjuangan saya dari berbagai hal hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang telah Ibunda lakukan kepada saya. Semoga Allah senantiasa beri keberkahan dan kesehatan kepada Ibunda
3. Kepada Ayah Hamdan, terima kasih atas dukungan dan doa Ayah selama ini. Terima kasih sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk belajar dan berproses

selama di Universitas Islam Indonesia dan merupakan anak perempuan pertama yang diberi kepercayaan menggapai mimpi tanpa rasa takut dan khawatirnya karena akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Alhamdulillah anak Ayah mampu melewati ini satu persatu. Semoga Allah senantiasa beri keberkahan dan kesehatan kepada Ayah

4. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

5. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

6. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.

Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa dan selama pembelajaran Penulis salah dalam bertindak maupun salah dalam berkata. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran segala urusannya oleh Allah SWT

7. Bapak Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sudah memberikan bimbingan, arahan, serta saran selama

penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi Penulis. Mohon maaf apabila selama Penulis menjadi mahasiswa sering melakukan kesalahan. Semoga Mas Uta selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT

8. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas semua ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan selama ini

9. Terima kasih kepada warga grup *PT. Taliban Corps*, yaitu Rosalina (ichi), Nadyya M, Kamila, Nirmala, Nesia yang sudah menjadi *support system* saya, tempat berkeluh kesah, tempat menangis, tempat ngelawak selama saya proses menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu hadir disaat suka maupun duka kalian sudah seperti keluarga bagi saya. Mohon maaf apabila selama berteman saya sering melakukan kesalahan. Semoga kita semua diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT. *By the way*, Angkringan Lathi udah ganti jadi cendol, nanti kita cari tempat lain untuk nikmatin hari ya.

10. Terima kasih kepada Rosalina, Kamila, dan Santika yang telah lama menjadi sahabat semasa kuliah hingga sampai saat ini mulai dari suka-duka, berbagi banyak hal, belajar banyak hal, ketawa karena hal gak jelas dan saling *support*. Terima kasih telah hadir dan mengajarkan banyak hal

mulai dari hal yang penting sampai hal gak penting. *So lucky to have y'all*

11. Terima kasih kepada Lembaga Pers Mahasiswa FPSB UII, yaitu Kognisia yang telah banyak beri pelajaran, dukungan dan nasihat selama masa berproses dan bekerjasama dalam hal jurnalistik di Lembaga Pers Kognisia. Terima kasih kepada Lina, Yunisa, dan Deka yang telah menjadi teman, rekan, serta sahabat di Kognisia atas ilmu dan dukungan yang diberikan kepada saya

12. Terima kasih kepada Kak Kenny Meigar, Nadya Maulidiyanti dan Santika Iza Hanifah yang telah banyak membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih juga atas dukungan, saran serta doa yang dihibahkan kepada saya. Saya sangat terbantu dari kakak dan teman-teman saya sampai skripsi ini selesai. Semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT

13. Terima kasih kepada teman-teman grup *Trio Galau*, yaitu Feny dan Vivi yang telah beri dukungan dan doa kepada saya. Terima kasih telah menjadi sahabat yang memberikan *postive vibes* kepada saya, menjadi tempat saya berkeluh kesah dan tempat bahagia saya. Semoga Allah beri keberkahan dan kesehatan buat Feny dan Vivi

14. Terima kasih kepada teman-teman grup *Timses Pack Wahyoe*, yaitu Imma, Tia (amoy), Tasya (mami) yang telah beri dukungan dan doa kepada saya. Terima kasih atas segala kalimat-kalimat yang membuat hati tergerak untuk melanjutkan skripsi hingga akhirnya saya telah menyelesaikan skripsi ini berkat perkataan baik kalian. Semoga kalian diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

15. Terakhir, terima kasih kepada Super Junior dan ATEEZ yang telah berkontribusi dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah menciptakan lagu yang sangat memotivasi saya untuk tetap lanjutkan kehidupan dan bertahan. Terima kasih atas lagu *Turbulence* oleh ATEEZ yang telah menemani saya selama proses mengerjakan skripsi dengan sepeggal kalimat “*Di ujung jalan ini, pada akhirnya kita di sini jika kita harus menjadi sesuatu dalam bentuk ini, aku berharap menjadi diriku sendiri.*”

Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah disebutkan, dimana telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dapat menemukan penelitian yang terbaru.

## ABSTRAK

Krisis pengungsi di wilayah Eropa menjadi penyebab terjadinya krisis pengungsi di Hongaria yang menjadi salah satu negara terkena dampak dari padatnya arus pengungsi tahun 2015. Uni Eropa (UE) menggunakan suatu kebijakan suakanya yang disebut *Common European Asylum System (CEAS)* dengan aturan relokasi pengungsi di tiap negara dalam mengatasi pengungsi. Viktor Orban sebagai Perdana Menteri Hongaria menolak kebijakan tersebut dengan membentuk kebijakan yang disebut sebagai Kebijakan Anti-imigran pada tahun 2015. Tahun 2018 kebijakan lain muncul yaitu *Stop Soros Law*, berfokus melarang organisasi internasional memberi bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. Implementasi kebijakan anti-imigran pada tahun 2015 hingga 2018 terdapat beberapa tindakan yang berdampak buruk bagi imigran di perbatasan Hongaria-Serbia dengan tidak adanya akses kesehatan, makanan, melakukan penahanan serta pemukulan didalam penahanan membuat imigran kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dan bertahan hidup di perbatasan. Implementasi tersebut masuk kedalam bentuk kekerasan struktural yang mana kekerasan muncul karena tidak adanya keadilan, ketidaksetaraan, tidak ada ruang gerak bagi korban dari struktur yang terbentuk.

**Kata Kunci:** Krisis Pengungsi, Imigran, Kekerasan Struktural, Viktor Orban, Hongaria, CEAS

## ABSTRACT

*The refugee crisis in Europe is the cause of the refugee crisis in Hungary, which is one of the countries affected by the dense flow of refugees in 2015. The European Union (EU) uses an asylum policy called the Common European Asylum System (CEAS) with rules for relocating refugees in each countries in dealing with refugees. Viktor Orban as Prime Minister of Hungary rejected this policy by establishing a policy known as the Anti-immigrant Policy in 2015. In 2018 another policy emerged, namely the Stop Soros Law, focusing on prohibiting international organizations from providing humanitarian assistance to refugees. The implementation of anti-immigrant policies in 2015 to 2018 contained several actions that had a negative impact on immigrants at the Hungarian-Serbian border with no access to health, food, detention and beatings in detention, making it difficult for immigrants to meet their needs and survive at the border. The implementation is in the form of structural violence where violence arises because of the absence of justice, inequality, and no space for victims of the structure that is formed.*

**Keywords:** *Refugee Crisis, Immigrants, Structural Violence, Viktor Orban, Hungary, CEAS*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>ABSTRAK</b>	xii
<b>ABSTRACT</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI</b>	xiv
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b>	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	4
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b>	5
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	6
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	9
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	11
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	13
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	13
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	13
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	13
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	14
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KRISIS PENGUNGSI DI HONGARIA DAN TERBENTUKNYA KEBIJAKAN ANTI-IMIGRAN TAHUN 2015</b>	15
<b>2.1 Kebijakan Uni Eropa <i>Common European Asylum System (CEAS)</i></b>	15
<b>2.2 Arus Pengungsi Di Hongaria Sejak Tahun 2015</b>	18
<b>2.3 Terbentuknya Kebijakan Anti-imigran di Hongaria Tahun 2015</b>	25
2.3.1 <i>Implementasi Kebijakan Anti-imigran di Hongaria Tahun 2015-2018</i>	29
<b>BAB III ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL PADA KEBIJAKAN ANTI-IMIGRAN DI HONGARIA TAHUN 2015-2018</b>	33
<b>3.1 Pemerintahan Viktor Orban sebagai Subjek Dalam Kekerasan Struktural</b>	33

<b>3.2</b>	<b>Para Imigran sebagai Objek Kekerasan Struktural dari Kebijakan Anti-imigran Hongaria</b>	35
<b>3.3</b>	<b>Kekerasan Secara <i>Latent</i></b>	36
<b>3.4</b>	<b>Kekerasan Secara <i>Manifest</i></b>	37
<b>3.5</b>	<b>Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikologis Terhadap Imigran</b>	39
<b>3.6</b>	<b>Motivasi <i>intended</i> dan <i>unintended</i> Kebijakan Anti-Imigran di Hongaria</b>	42
<b>3.7</b>	<b>Pendekatan Negatif Kebijakan Anti-Imigran di Hongaria</b>	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>		48
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan</b>	48
<b>4.2</b>	<b>Rekomendasi</b>	49
<b>Daftar Pustaka</b>		51



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Jumlah Permohonan Suaka Di Eropa Tahun 2015-2018.....	16
Tabel 2.3.1 Jumlah Permohonan Suaka Di Hongaria Tahun 2015-2018.....	29
Gambar 1.6 Segitiga Kekerasan Oleh Johan Galtung.....	9
Gambar 2.2 Permohonan Suaka di Eropa Tahun 2015.....	22

### DAFTAR SINGKATAN

CEAS	: <i>Common European Asylum System</i>
UE	: <i>Uni Eropa</i>
AIDA	: <i>Asylum Information Data</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara-negara konflik merupakan penyebab utama terjadinya krisis pengungsi di wilayah Eropa. Krisis pengungsi besar-besaran di Eropa terjadi pada tahun 2015 dengan kedatangan imigran dari negara berkonflik terutama di Timur Tengah dan yang paling mendominasi yaitu dari negara Afghanistan, Suriah dan Iraq dengan besarnya jumlah imigran yang masuk ke wilayah Eropa. Banyaknya imigran yang masuk ke wilayah Eropa telah mengganggu keamanan negara dan mendapat keluhan dari negara-negara Uni Eropa salah satunya yaitu Hongaria. Hongaria menjadi negara transit dan negara tujuan imigran Timur Tengah untuk mendapatkan tempat tinggal dengan alasan posisi negara tersebut yang strategis (L. Dearden 2015).

Adapun negara Uni Eropa yang juga tidak setuju dengan kedatangan para imigran di Eropa yaitu Republik Ceko, Polandia dan Slovakia disebut sebagai Visegrad Group (V4) termasuk Hongaria didalamnya. Hongaria merupakan negara pertama yang melakukan penolakan imigran dan didukung oleh ketiga negara tersebut dengan membuat perbatasan (Stepper 2016). Dapat diketahui bahwa pernyataan penolakan imigran oleh negara V4 berdasarkan permintaan Hongaria untuk bekerjasama sehingga ketiga negara mendukung hal itu dan perbedaannya ialah salah satunya seperti Republik Ceko hanya berlandaskan anti-islam dan menutup wilayah sedangkan Hongaria melakukan penolakan keras terhadap para imigran menggunakan kekerasan hingga menyebarkan xenophobia kepada

masyarakat Hongaria terhadap imigran sebab semakin banyak nya jumlah imigran yang datang (Sik 2016).

Krisis pengungsi di Eropa yang disebabkan oleh para imigran terutama dari imigran di negara konflik wilayah Timur Tengah dengan banyaknya jumlah pengungsi dan imigran ilegal masuk ke wilayah Eropa akibat dari konflik tersebut membuat Uni Eropa melakukan kebijakan tentang aturan relokasi pengungsi yaitu *Common European Asylum System (CEAS)* yang di mana negara-negara anggota Uni Eropa membantu negara anggota lain untuk menampung populasi pengungsi yang cukup besar dan ini dianggap sebagai bentuk solidaritas negara anggota UE serta mengurangi beban internal negara – negara UE (Jakuleviciene 2016). Berkaitan dengan kasus ini, Hongaria sebagai salah satu negara bagian Eropa Tengah yang berada di bawah pemerintahan Viktor Orban, menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan Uni Eropa dan membuat sebuah kebijakan penolakan terkait imigran yang mulai banyak melakukan permohonan suka di beberapa negara bagian Eropa dan akan berdampak ke Hongaria dilihat dari cukup banyaknya permohonan suka tahun 2015 sekitar 177.135 permohonan suka (Goździak 2019).

Kebijakan yang dibuat oleh Viktor Orban ini disebut sebagai kebijakan anti-imigran yang merupakan penolakan atas masuknya imigran yang datang ke Hongaria dan merupakan bentuk tindakan yang termasuk dalam kekerasan struktural dilihat dari penerapan kebijakannya. Kasus krisis pengungsi telah menjadi topik yang menarik perhatian diantara negara – negara Uni Eropa terutama Hongaria karena semakin banyaknya permohonan pencari suka dan banyaknya imigran tidak berdokumen yang mencoba masuk ke perbatasan wilayah Hongaria.

Oleh karena itu, Viktor Orban sebagai perdana menteri Hongaria membuat suatu kebijakan anti-imigran dengan alasan mengatasi jumlah imigran yang ada di Hongaria, sebagai upaya Viktor Orban untuk melindungi identitas nasional, ekonomi, dan untuk partai politiknya yaitu partai Fidesz serta masyarakat Hongaria (Goździak 2019).

Penolakan ini dilakukan atas dasar untuk keamanan Hongaria karena PM Viktor Orban takut dengan kedatangan imigran di Hongaria. Keberadaan pra imigran dapat menjadi dampak buruk bagi Hongaria, dapat memungkinkan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh imigran terhadap masyarakat Hongaria (Meszaros 2016). Penerapan kebijakan anti-imigran oleh Viktor Orban termasuk pada bentuk kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan dan telah ada didalam sebuah struktur yang membuat orang-orang tidak dapat untuk memenuhi kebutuhannya dalam arti pihak lain tidak mendapatkan akses untuk kebutuhan hidup dan hanya menguntungkan satu pihak atas kekuasaan yang berada pada sebuah struktur. Dapat diketahui dengan melihat perkembangan kebijakan anti-imigran dengan cara pembiaran terhadap akses kebutuhan makanan, kesehatan, memiliki *camp*, dan melakukan penahanan terhadap imigran, Hongaria mendapat kecaman dari negara-negara lain karena telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan membatasi ruang gerak imigran dilihat dari cara penerapannya (Hardigan 2022).

Tindakan – tindakan yang dilakukan sejak tahun 2015 seperti penahanan, kekerasan, membatasi wilayah dengan pagar perbatasan dan tindakan lainnya terhadap para imigran yang datang ke perbatasan Hongaria-Serbia dapat berdampak buruk bagi imigran tersebut sehingga tindakan ini masuk kepada bentuk dari

kekerasan terhadap imigran (Simonovits 2020). Di tahun 2018, Viktor Orban mendapat kredibilitas dari masyarakat Hongaria dengan terpilihnya Viktor Orban sebagai perdana menteri Hongaria yang mana salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan adanya kebijakan anti-imigran ini.

Alasan lain Viktor Orban membentuk kebijakan bersama partai sayap kanan nya partai Fidesz dengan melihat bahwa masuknya imigran tersebut akan mengancam keamanan ekonomi dan identitas nasional di Hongaria sehingga ia membuat kebijakan anti-imigran dengan tujuan keamanan nasional dan tujuan lainnya terdapat pada tindakan politik Viktor Orban. Akan tetapi, hal ini menunjukkan kebijakan yang dibuat Viktor Orban menimbulkan bentuk kekerasan struktural terhadap para imigran yang mencari suaka ke wilayah Eropa terutama ke negara Hongaria. Dengan adanya kebijakan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait bentuk kekerasan struktural yang ditimbulkan terhadap imigran yang datang ke Hongaria dan akan menjadi pembahasan selanjutnya secara detail.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kekerasan struktural yang terjadi terhadap imigran dari kebijakan anti-imigran era pemerintah Viktor Orban di Hongaria pada tahun 2015-2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui kekerasan struktural yang terjadi pada implementasi kebijakan anti-

imigran oleh pemerintah Hongaria dan dari penelitian ini dapat memperoleh pengetahuan baru terkait pendekatan - pendekatan kekerasan struktural dari sebuah studi kasus yang dijelaskan seperti kebijakan anti-imigran oleh Viktor Orban.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis melalui pendekatan kekerasan struktural dari implementasi kebijakan anti-imigran seperti adanya aktor, dampak fisik, dampak psikologis, dorongan (motivasi) pemerintah Hongaria membuat kebijakan ini terhadap imigran. Fokus penulis pada era pemerintah Viktor Orban yang membuat suatu kebijakan anti-imigran bagi imigran yang datang ke negara Hongaria. Pada tahun 2015-2018 yang mana pada tahun 2015 menjadi puncak terjadinya krisis pengungsi di Hongaria hingga tahun 2018 Viktor Orban telah mengubah kebijakan anti-imigran ini menjadi kebijakan baru yang disebut sebagai kebijakan *Stop Soros Law* dengan menghentikan bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional ke pengungsi (Sherin 2021).

Alasan nya karena tahun penerapan kebijakan tersebut menimbulkan ancaman keamanan bagi pengungsi itu sendiri seperti kekerasan yang dialami oleh pengungsi saat melakukan permohonan mencari suaka bahkan yang berada diperbatasan Hongaria akan mendapat hukuman dan tidak mendapat akses kebutuhan pokok. Tindakan menentang adanya imigran ini juga muncul karena kebijakan anti-imigran yang dilegalkan Viktor Orban terkait mengatasi para pengungsi yang masuk ke Hongaria. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis dari sudut pandang lain melalui kekerasan struktural yang ditimbulkan pada kebijakan anti-imigran oleh Viktor Orban terhadap pengungsi yang datang ke Hongaria.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal Boldizsár Nagy berjudul *“Renegade in the Club – Hungary’s Resistance to EU Efforts in the Asylum Field”* yang menjelaskan tentang Uni Eropa (UE) mengalami krisis pengungsi tahun 2015 dengan menetapkan suatu aturan kepada negara anggota UE untuk memegang prinsip kebebasan, demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. UE berharap negara anggota dapat bekerjasama dalam mengatasi krisis pengungsi yang terjadi melalui prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, Hongaria menolak prinsip tersebut dengan alasan negara tersebut hanya ingin menjaga keamanan masyarakat dan nasional Hongaria dari imigran Timur Tengah yang telah memasuki wilayah Eropa (Nagy 2017).

Hal ini membuat UE menyatakan bahwa Hongaria telah menghancurkan system suakanya sendiri dan telah menghalangi solidaritas antar negara anggota UE. Saat itulah Hongaria mengabaikan respon UE terhadap tindakan Hongaria yang tidak menginginkan adanya imigran di negara mereka, Hongaria membuat aturan penolakan imigran Timur Tengah dengan alasan negara ketiga, negara yang tidak sedang mengalami peperangan ataupun krisis lainnya dan pemerintah Hongaria memasang perbatasan seperti pagar dijalur Hongaria–Serbia. Hongaria menyatakan bahwa dengan membangun pagar dan menolak imigran merupakan bentuk solidaritas dengan UE tetapi tindakan seperti itulah yang dikecam oleh UE sehingga pada sidang pleno Parlemen Eropa, juru bicaranya menyebutkan akan berusaha memberikan hukuman kepada negara anggota yang menolak imigran (Nagy 2017).

Krisis pengungsi yang terjadi di Hongaria membuat pemerintah Hongaria mengatakan bahwa ini adalah tekanan migrasi. Imigran yang datang ke Eropa

dianggap sebagai terorisme oleh pemerintah Hongaria karena tentang aksi teror yang pernah terjadi di wilayah Eropa dan mengancam keamanan tiap negara Eropa (Lurcza 2018). Hongaria menyatakan imigrasi dan terorisme adalah hal yang sama karena imigran yang datang akan mengancam keamanan nasional negara Hongaria dan mereka dapat melakukan aksi teror terhadap Hongaria. Hal ini merupakan pernyataan pemerintah Hongaria yang berkaitan dengan kebijakan Hongaria anti-imigran dengan melakukan penutupan perbatasan pada Hongaria, pembatasan sipil dan memberikan akses bagi masyarakat yang anti-imigran, kelompok anti-islam atau islamphobia yang tertulis dalam jurnal nya Zsuzsanna Lurcza yang berjudul *“Actuality and Untimeliness in The Discourse on The Refugee Crisis The Case of Hungary”* (Lurcza 2018).

Berbeda dengan buku Robin Alison Remington dan Robert K *“Globalization and Regime Change: Lessons from the New Russia and the New Europe”* yang menjelaskan selama masa krisis pengungsi di Eropa hingga berdampak pada negara Hongaria yang permohonan suaka nya semakin banyak, dalam kasus tersebut pemerintah Hongaria melakukan penolakan terhadap komisi Eropa tentang kuota wajib untuk relokasi migran. Melalui kampanye dan mengadakan referendum dengan memperkuat legitimasi pemerintah Hongaria dalam ketidaksetujuannya dengan relokasi migran tersebut. Respon Hongaria terkait krisis pengungsi yaitu dengan mengeluarkan kebijakan anti-imigran dan melakukan kerja sama dengan negara-negara yang menolak adanya relokasi migran. Hongaria mendapat dukungan dari kelompok nasionalis sayap kanan di Eropa karena kebijakan anti-imigran. Pembahasan kebijakan ini lebih kepada

terkait kerja sama Hongaria dengan negara–negara yang mendukungnya untuk penolakan relokasi migran dan penutupan perbatasan wilayah (Robert 2019).

Adapun ketidakpatuhan Hongaria terhadap kebijakan suaka dan migrasi oleh Uni Eropa ini dapat dilihat dari adanya kebijakan anti-imigran yang dibuat oleh pemerintah Viktor Orban untuk membatasi masuk nya imigran ke wilayah Hongaria. Akan tetapi, kebijakan ini lebih tampak pada dipolitisasi yaitu salah satu nya administrasi terkait suaka pada bidang birokrasi. Sejak partai politik dengan tindakan eksekutif administratif yang dilakukan membuat ketidakpatuhan kebijakan ini terhadap hukum Uni Eropa. Ketidaksetujuan Viktor Orban dengan kebijakan Uni Eropa terkait relokasi imigran membuat kebijakan anti-imigran termasuk pada ketidakpatuhan Hongaria dengan hukum Uni Eropa dan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Uni Eropa yang dituliskan oleh Astrid Lorenz dan Lisa H. Anders dalam buku nya “*Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe*” (Anders 2021).

Penulis melihat bahwa kebijakan anti-imigran yang telah dibahas oleh penelitian–penelitian diatas lebih berfokus pada pemerintah Hongaria yang menimbulkan tidak adanya solidaritas terhadap negara anggota UE dalam arti lebih mengutamakan kepentingan sendiri dan tidak menuruti aturan UE lalu ada filosofi publik terhadap imigran, kerjasama yang dilakukan Viktor Orban dengan negara–negara UE yang juga menolak relokasi kuota imigran, dan ketidakpatuhan Viktor Orban terhadap hukum UE dengan adanya kebijakan anti-imigran tersebut. Dapat diketahui penelitian diatas belum ada yang membahas terkait kekerasan struktural yang terjadi terhadap imigran sehingga penulis akan menganalisis dari sudut pandang lain dengan melihat dampak buruk yang terjadi pada para imigran yang

datang akibat dari implementasi kebijakan anti-imigran yang telah melanggar hak asasi manusia sejak tahun 2015 dengan melakukan tindakan kriminal dan kekerasan pada imigran diperbatasan dan sebagaimana kebijakan ini menguntungkan bagi Viktor Orban dalam pencapaian politiknya pada tahun 2018.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

### *Konsep kekerasan struktural*

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep kekerasan struktural yang dicetuskan oleh Johan Galtung yang berjudul “*Violence, Peace, and Peace Research*” diambil dari tiga macam kekerasan dari bentuk segitiga kekerasan yaitu kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Dalam pemahaman Galtung, kekerasan dapat terjadi pada setiap kondisi fisik, rasa emosional, verbal, struktural, perilaku, sikap, kebijakan, atau kondisi yang melemahkan, mendominasi dan menghancurkan diri sendiri serta oranglain. (Galtung 1969). Berikut gambaran segitiga kekerasan yang sesuai dengan pemahaman Galtung:



**Gambar 1.6** Segitiga Kekerasan Oleh Johan Galtung (Cahyokusumo 2021).

Dari gambar segitiga kekerasan tersebut, kekerasan langsung berada pada bagian yang terlihat sedangkan kekerasan kultural dan kekerasan struktural berada pada bagian yang tidak terlihat. Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang dilakukan secara langsung (pukulan) baik itu dari individu maupun kelompok terhadap seseorang. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang berasal dari struktur sosial yang dapat berpengaruh buruk pada masyarakat tertentu dan tidak terpenuhi nya kebutuhan seseorang atas ketidaksetaraan yang dialami. (Galtung 1969). Sedangkan kekerasan kultural, Galtung menjelaskan kekerasan ini berbasis pada ideologi, budaya, bahasa dan seni, ilmu empirik dan ilmu logika yang dapat melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Hubungan dari segitiga kekerasan ini dapat dimulai dari arah kekerasan manapun karena ketiga nya dapat melegitimasi satu sama lain seperti dari hubungan sebab – akibat dari tiga kekerasan tersebut. Kekerasan struktural seperti yang telah dijelaskan bahwa kekerasan struktural merupakan kekerasan yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu, ini berdampak pada masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Kekerasan karena suatu sistem yang berjalan pada struktur sosial ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan dari pengaruh kekuasaan.

Dalam aplikasi konsep kekerasan struktural pada penelitian ini, yang mendorong terjadinya kekerasan struktural dapat dilihat dari kekerasan yang dilakukan oleh struktur sosial maupun institusi seperti pemerintah sehingga adanya pengaruh kekuasaan yang menghalangi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan menimbulkan adanya ketidaksetaraan oleh orang – orang dibawah pemegang kekuasaan yang hanya menguntungkan satu pihak (Galtung 1969).

Seperti pada kebijakan anti-imigran yang dibuat oleh pemerintah Hongaria terhadap para imigran yang datang ke wilayah Hongaria.

Terdapat enam perbedaan kekerasan melalui dinamika kekerasan sesuai dengan kasus yang diangkat dalam konsep kekerasan struktural yaitu bagian pertama, subjek sebagai individu atau aktor yang melakukan tindakan kekerasan struktural. Kedua, objek sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi korban dari kekerasan. Ketiga, *latent* ialah sesuatu yang tersembunyi akan tetapi dapat memungkinkan terjadinya kekerasan, *manifest* ialah kekerasan yang dapat disadari oleh pihak – pihak yang terlibat.

Keempat, kekerasan fisik dan dampak psikologis terhadap orang yang mengalami kekerasan dari perilaku actor. Kelima, kekerasan yang berasal dari sebuah dorongan atau motivasi melakukan kekerasan yaitu *Intended* ialah kekerasan yang terjadi dengan disengaja dan *Unintended* ialah kekerasan yang terjadi tidak disengaja. Keenam, pendekatan positif yaitu sebuah imbalan yang diberikan kepada objek ketika objek menaati aturan yang telah dibentuk sedangkan pendekatan negatif (*punishment*) sebagai sebuah hukuman yang diberikan kepada objek.

### **1.7 Argumen Sementara**

Penulis akan menganalisis berdasarkan enam perbedaan kekerasan struktural tersebut yang telah dijelaskan oleh Galtung. Dapat dilihat dari subjek yang menjadi pelaku utama ialah Viktor Orban bersama partai Fidesz partai sayap kanan yang membuat dan merancang kebijakan anti-imigran yang menimbulkan

tindakan kekerasan terhadap imigran. Selain itu, objek yang ditunjukkan yaitu para imigran yang datang ke Hongaria dan yang berada diperbatasan Hongaria-Serbia.

Adanya pontesi dan aktualisasi kekerasan berdasarkan tingkatan kekerasan yang dibentuk dalam kategori *latent* (kekerasan tersembunyi tetapi memungkinkan akan hadirnya kekerasan) dan *manifest* (kekerasan yang dapat terlihat secara nyata hingga adanya sebuah kekerasan) dari kebijakan anti-imigran oleh pemerintah Viktor Orban diketahui bahwa tingkatan kekerasan ini termasuk pada kekerasan bersifat *manifest* dengan melakukan penjara bagi imigran yang melanggar aturan dan dibangun pagar besi dilapisi kawat diperbatasan Hongaria-Serbia (Göbl 2015).

Dapat diketahui kekerasan fisik seperti pemukulan dan penahanan terhadap imigran yang melewati perbatasan Hongaria-Serbia sehingga kekerasan fisik ini tidak dapat menutup kemungkinan bahwa akan menimbulkan dampak pada psikologis imigran yang merasakannya seperti trauma dan putus asa (UNHCR 2016). Adapun motivasi atau dorongan (*intended* dan *unintended*) terjadinya kekerasan struktural oleh pemerintah Hongaria yaitu disatu sisi kebijakan ini dibuat untuk keamanan identitas nasional dan ekonomi Hongaria masuk pada kategori *unintended* akan tetapi disisi lain berbagai dugaan muncul bahwa kebijakan ini untuk mendiskriminasi imigran muslim dengan alasan akan mengancam nilai – nilai Kristen di Hongaria dapat menjadi *intended* (AFP 2021).

Terakhir, penulis berfokus pada pendekatan negatif (*punishment*) yaitu hukuman penjara bagi imigran yang melanggar aturan dari Viktor Orban dan bagi mereka yang mencoba melewati perbatasan pagar kawat yang telah dibangun akan mendapatkan konsekuensinya (Kekesi 2017). Berdasarkan enam perbedaan tersebut diharapkan mampu menjawab rumusan masalah terkait kekerasan

struktural pada kebijakan anti-imigran di era pemerintah Viktor Orban di Hongaria tahun 2015-2018. Dari penjelasan diatas, penulis dapat menarik argumen bahwa tindakan penolakan terhadap imigran melalui implementasi kebijakan anti-imigran ini menimbulkan bentuk kekerasan struktural terhadap imigran.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan cara pengumpulan data bersumber dari narasi – narasi, pengamatan dan dokumen dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dalam pembahasan agar penjelasan lebih spesifik dan hanya memiliki objek yang sedikit dalam penelitian tersebut.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek pada penelitian ini penulis berfokus kebijakan anti-imigran sejak tahun 2015 pada era pemerintahan Viktor Orban di Hongaria yang menyebabkan terjadinya kekerasan struktural terhadap para imigran yang datang ke Hongaria dan para imigran tersebut masuk kepada objek penelitian yang akan penulis bahas dalam penelitian ini.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Penulis menggunakan penelitian sekunder sebagai metode pengumpulan data melalui artikel – artikel, berita, website resmi, jurnal – jurnal, dan buku – buku yang menjadi sumber studi pustaka penulis dalam pembahasan untuk menganalisis kekerasan struktural yang terjadi pada para imigran dari kebijakan anti-imigran pemerintah Hongaria yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### 1.8.4 Proses Penelitian

Proses pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, perumusan masalah, menyusun kerangka teori, tujuan penelitian, analisis dan menjelaskan hasil penelitian. Proses selanjutnya penulis melakukan pembahasan terkait krisis pengungsi di Hongaria dan analisis terhadap kekerasan struktural dari kebijakan anti-imigran oleh Viktor Orban terhadap para imigran tahun 2015-2018.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

**BAB I**, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi, landasan konseptual, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, proses penelitian dan sistematika pembahasan. **BAB II**, tentang pengungsi yang datang ke Eropa tahun 2015 hingga terjadinya krisis pengungsi di Hongaria dan arus pengungsi di Hongaria tahun 2015. **BAB III**, tentang analisis kekerasan struktural terhadap para imigran diperbatasan melalui kebijakan anti-imigran oleh Viktor Orban tahun 2015-2018 melalui konsep kekerasan struktural. **BAB IV**, penutup berisikan kesimpulan dan saran yang menyajikan secara ringkas pembahasan oleh penulis yang diperoleh berdasarkan analisis dan interpretasi data – data yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KRISIS PENGUNGSI DI HONGARIA DAN TERBENTUKNYA KEBIJAKAN ANTI-IMIGRAN TAHUN 2015

Krisis pengungsi di Eropa sejak tahun 2015 merupakan salah satu kasus yang menjadi permasalahan besar bagi negara-negara Eropa dengan meningkatnya arus migrasi dari wilayah konflik Timur Tengah menuju wilayah Eropa bertujuan untuk mencari tempat berlindung dan mendapat sumber kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Uni Eropa telah membuat kebijakan *Common European Asylum System (CEAS)* sebagai bentuk respon penanganan krisis pengungsi akan tetapi kebijakan tersebut mendapat penolakan dari salah satu negara di Eropa Tengah yaitu Hongaria dipimpin oleh perdana menteri Viktor Orban dengan mengetahui isi dari kebijakan tersebut. Pada akhirnya, kebijakan penolakan dibuat oleh Hongaria yang terbentuk sebagai respon dari penolakan kebijakan CEAS.

#### 2.1 Kebijakan Uni Eropa *Common European Asylum System (CEAS)*

Peristiwa pengungsi besar-besaran terjadi hingga ratusan masyarakat di negara konflik seperti Iraq, Afghanistan, Suriah dan negara lainnya melarikan diri dari wilayah konflik. Banyaknya pengungsi yang datang ke wilayah Eropa yaitu pengungsi dari Timur Tengah seperti Iraq, Afghanistan dan Suriah dan besarnya jumlah pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa mengganggu keamanan serta mendapat keluhan dari beberapa negara anggota di Uni Eropa (L. Dearden 2015). Berikut data berdasarkan jumlah pencari suaka yang ada di wilayah Eropa sejak tahun 2015-2018:

**Tabel 2.1 Jumlah Permohonan Suaka Di Eropa Tahun 2015-2018** (Eurostat 2021)

<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1.216.860	1.166.815	620.265	564.115
Pencari Suaka	Pencari Suaka	Pencari Suaka	Pencari Suaka

Dilansir dari data Eurostat yang melaporkan bahwa tahun 2015 di Eropa terdapat 1,2 juta permohonan suaka dan mulai sedikit menurun pada tahun 2016 sekitar 1,1 juta pencari suaka. Pada tahun 2017 terdapat sekitar 620.265 permohonan suaka hingga tahun 2018 semakin menurun mencapai 564.115 permohonan suaka oleh para imigran. Puncak meningkatnya pengungsi di Eropa yang terjadi pada tahun 2015 menyebabkan Eropa mengalami krisis pengungsi dan tahun berikutnya Eropa masih mengalami krisis pengungsi tersebut berdasarkan jumlah pencari suaka di wilayah Eropa masih belum dapat ditanggulangi dengan naik turun nya pencari suaka (Eurostat 2021).

Ditahun 2015 menjadi puncak terjadinya krisis pengungsi di Eropa menyebabkan negara – negara Uni Eropa menuntut terhadap Uni Eropa untuk turut aktif dalam menyelesaikan krisis pengungsi yang terjadi di Eropa yang semakin melonjak tinggi (L. Dearden 2015). Sebagai respon terhadap krisis pengungsi Uni Eropa (UE) membentuk *Common European Asylum System* (CEAS) bertujuan untuk berkontribusi terhadap program relokasi UE, membantu negara-negara anggota untuk memenuhi kewajiban nasional dan internasional mereka dalam memberi perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan, bertindak sebagai pusat keahlian bidang suaka dan berkontribusi dalam perkembangan *Common*

*European Asylum System* (CEAS) sebagai kerangka kebijakan pengungsi (EASO 2017).

CEAS sebagai kerangka kebijakan pengaturan pengungsi yang didukung oleh Parlemen Eropa dan Dewan Eropa yang mana kebijakan ini sebagai kebijakan darurat krisis pengungsi akibat semakin banyak yang memasuki wilayah Eropa. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk penanganan darurat krisis pengungsi yang mencakup penanganan migrasi ilegal dan legal, keamanan internal dan juga pembagian kuota pengungsi tiap negara (European Commission 2015). Adapun dari kebijakan *Common European Asylum System* (CEAS) didalamnya terdapat upaya penanganan krisis pengungsi yang terjadi (European 2015).

Sistem suaka negara-negara menghadapi tekanan akibat arus migrasi yang melonjak yang mana Uni Eropa tidak boleh menunggu sampai tekanan ini tidak dapat toleransi lagi sehingga komisi UE mengusulkan untuk melakukan sistem tanggap darurat. Sistem ini ditujukan pada orang-orang yang membutuhkan tempat perlindungan dengan negara anggota penerima yang akan bersedia menampung migran yang datang disebut sebagai sistem relokasi. Uni Eropa melakukan sistem relokasi ini mengacu pada orang yang mengalami bahaya langsung dari wilayah konflik dengan cara memindahkan orang dari satu negara anggota ke negara lainnya untuk mendapat perlindungan kemanusiaan yang dianggap sebagai prinsip solidaritas antar negara anggota (European Parliament 2015, 4).

Relokasi dilakukan karena dua negara penerima pengungsi terbesar di Eropa yaitu Yunani dan Italia mengalami kendala menangani pengungsi yang semakin banyak akan tetapi sistem tersebut mendapat penolakan dari negara-negara Visegrad yaitu Hongaria, Polandia, Republik Ceko dan Slovakia (Meretab 2018).

Alasan negara tersebut menolak karena pengungsi dapat mengancam kepentingan nasional, ekonomi dan budaya negara tersebut hingga menolak keberadaan pengungsi yang mana penolakan ini disebabkan karena rasa takut terhadap kehadiran pengungsi akan berdampak buruk bagi negara mereka. Pertentangan ini dianggap sebagai prinsip tidak solidaritas sesama negara anggota, merusak moral pada UE serta legitimasi hukum (Meretab 2018).

Hongaria merupakan salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut termasuk negara yang menjadi tujuan para pengungsi dari berbagai negara terutama negara-negara wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan dan Iraq yang sering mengalami konflik di negara mereka sehingga mereka melakukan imigrasi ke wilayah Eropa untuk mendapat perlindungan, ini terjadi sejak tahun 2015. Pengungsi yang mencoba datang ke negara-negara sekitar Hongaria dan menuju Hungaria membuat Viktor Orban sebagai perdana menteri Hongaria waspada terhadap kedatangan pengungsi sebab kedatangan pengungsi ke Hongaria akan membawa dampak negatif dan mengganggu keamanan di negara tersebut.

## **2.2 Arus Pengungsi Di Hongaria Sejak Tahun 2015**

Sekilas sejarah tentang negara Hongaria, Hongaria merupakan negara yang terletak dibagian Eropa Tengah yang berbatasan langsung dengan Slovakia sebelah utara, Serbia disebelah selatan, Romania disebelah timur, Kroasia disebelah barat daya, Ukraina sebelah timur laut dan Slovenia disebelah barat. Jumlah penduduk sekitar 9,6 juta jiwa penduduk Hongaria dengan mayoritas nya 90% etnis asli Hongaria selebihnya etnis pendatang dari berbagai negara tetangga, sehari-hari nya masyarakat menggunakan bahasa resmi Hongaria. Negara Hongaria dipimpin oleh

Perdana Menteri Viktor Orban yang juga ketua dari partai Fidesz dengan menggunakan sistem politik parlementer (Barany 2022).

Dalam sejarahnya pada abad pertama, Hongaria mengalami masa Kerajaan Kristen lalu diruntuhkan oleh Kerajaan Turki Utsmani sebab pertahanan tidak kuat oleh Hongaria ketika melawan Kerajaan Turki Utsmani di wilayah Eropa. Keruntuhan Hongaria membuat negara nya berubah menjadi negara komunis yang berada dibawah kekuasaan Uni Soviet pasca terjadinya perang dunia kedua. Setelah nya, Uni Soviet mengalami keruntuhan dan ekonomi Hongaria mulai menurun (Barany 2022).

Hongaria mulai mengubah sistem ekonominya dengan melakukan privatisasi perusahaan milik negara dan mengurangi pinjaman sosial serta beralih ke ekonomi pasar mengikuti sistem perekonomian Barat, kondisi awalnya ekonomi memburuk perlahan berubah menjadi membaik setelah reformasi ekonomi Hongaria menggunakan ekonomi pasar agar dapat masuk ke pasar perdagangan Barat sehingga pada tahun 2004, Hongaria resmi menjadi negara anggota dari Uni Eropa (UE) sebab adanya reformasi ekonomi yang mulai membaik (Barany 2022).

Perekonomian Hongaria tahun 2008 sempat mengalami krisis global yang mana sampai akhirnya Hongaria juga mengalami krisis pengungsi pada tahun 2015 akibat dari krisis pengungsi yang terjadi di Eropa (Barany 2022). Adanya krisis ekonomi yang masih belum pulih, membuat Hongaria mengambil sikap waspada terhadap pengungsi yang datang ke wilayah Hongaria sebab dapat pengungsi akan semakin memperburuk ekonomi Hongaria yang belum sepenuhnya membaik. Hongaria sebagai negara bekas Kerajaan Kristen dengan agama Kristen yang dapat berpengaruh pada sikap sosial masyarakat Hongaria dalam bermasyarakat dan

agama Kristen menjadi pedoman hidup masyarakat Hongaria yang di implementasikan dalam kehidupan sehari – hari (Hafez 2016).

Oleh karena itu, budaya Kristen tidak bisa dipisahkan dalam sosial masyarakat Hongaria dan dari inilah muncul sikap islamophobia Hongaria terhadap masyarakat muslim dengan mengingat kembali runtuhnya Kerajaan Kristen oleh Kerajaan Islam Turki Utsmani. Ketakutan itu membuat sikap Viktor Orban melihat pengungsi dari Timur Tengah sebagai ancaman dan menjadi penyebab utama dari krisis pengungsi yang terjadi di Eropa tahun 2015 (Hafez 2016).

Kasus krisis pengungsi membuat kondisi wilayah Eropa terutama pada Hongaria semakin buruk. Terkait kasus tersebut Uni Eropa melakukan respon selama masa krisis pengungsi dengan membuat suatu kebijakan untuk menghadapi krisis pengungsi yang terjadi yaitu Council Decision (EU) 2015/1601 atau istilah lainnya disebut dengan relokasi pengungsi, isi dari keputusan itu adalah membagi beban pengungsi ke negara anggota Uni Eropa berdasarkan kemakmuran dan ekonomi negara masing-masing (Uni Eropa 2015).

Uni Eropa mengajak UNHCR untuk bekerjasama dalam mengimplementasikan keputusan ini. Dalam keputusan itu terdapat sanksi yang akan diberikan kepada negara-negara yang menolak *Council Decision* (EU) 2015/1601 pada 22 September 2015 dengan denda sebesar €250,000 disetiap negara yang menolak (Uni Eropa 2015). Pada dasarnya, Hongaria sebagai salah satu negara anggota di Uni Eropa menolak proposal yang ditetapkan ini. Péter Szijjártó sebagai Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria saat itu mengatakan keputusan tersebut tidak realistis karena menurutnya keputusan itu yang akan membuat pengungsi Timur Tengah

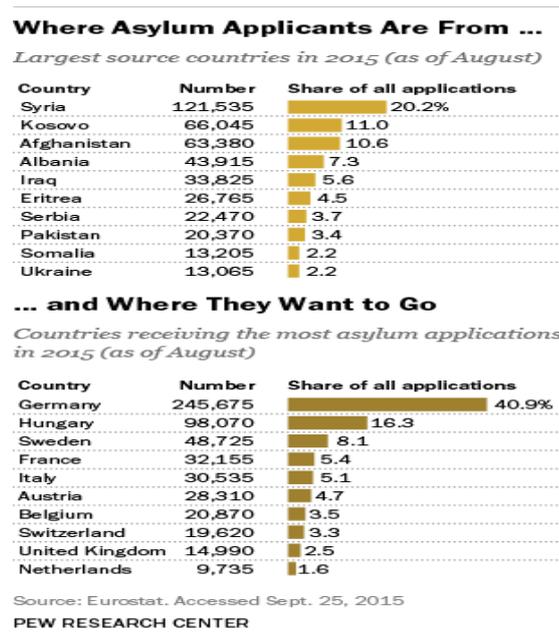
semakin banyak di Eropa dan itu bukanlah keputusan yang solutif (Dan Nolan 2015).

Dari tanggapan Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria, terdapat respon lain dari Perdana Menteri Hongaria yaitu Viktor Orban dengan melakukan penolakan terhadap relokasi kuota pengungsi terutama ke dalam negaranya, dapat diketahui juga bahwa Hongaria termasuk negara yang banyak mendapat permohonan suaka setelah Jerman. Bagi Hongaria, krisis pengungsi tahun 2015 merupakan krisis pengungsi terbesar yang dialami oleh Hongaria. Oleh karena itu, Viktor Orban sangat waspada melakukan penolakan relokasi kuota pengungsi oleh Uni Eropa.

Pada bulan Juni 2015, terdapat jumlah pengungsi yang memasuki perbatasan Hongaria dengan jumlah sekitar 1.000 orang per harinya dan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 8.000 per harinya pada pertengahan september (Ivanova 2017). Di akhir Oktober 2015, Hongaria menyatakan bahwa terdapat jumlah permohonan suaka lebih dari 199.165 pemohon suaka yang mana angka ini menjadi angka kedua terbesar setelah Jerman yaitu negara yang menjadi tujuan utama para pengungsi (Gaynor 2022).

Semakin meningkatnya pemohon suaka di Hongaria hal inilah yang membuat Viktor Orban mengambil tindakan penolakan relokasi kuota pengungsi. Perdana menteri Viktor Orban melakukan beberapa tindakan lainnya untuk menanggulangi krisis pengungsi yang ada di negaranya yaitu melakukan pembatasan menggunakan pagar kawat besi, menahan pengungsi yang melanggar aturan dan melakukan kekerasan terhadap pengungsi yang mencoba memasuki perbatasan Hongaria secara ilegal (Benvenuti 2016).

Keputusan yang diambil oleh Viktor Orban terhadap kebijakan relokasi kuota pengungsi ini mendapat kecaman dari Uni Eropa dan negara-negara yang mendukung kebijakan tersebut. Uni Eropa menyatakan bahwa Hongaria tidak solidaritas dan melanggar aturan Uni Eropa dalam sisi kemanusiaan (Benvenuti 2016). Menurut data yang diambil dari Eurostat, Hongaria tahun 2015 mendapat banyak permohonan suaka terutama dari pengungsi Timur Tengah seperti yang dijelaskan pada data dibawah ini:



**Gambar 2.2 Permohonan Suaka di Eropa Tahun 2015 (Desilver 2015)**

Dari data Eurostat telah menjelaskan, terkait permohonan suaka bahwa Hongaria berada pada posisi kedua negara yang banyak mendapat pemohon suaka setelah Jerman dengan jumlah sekitar 98.070 orang (16,3% dari total). Meskipun itu lebih mungkin berkaitan dengan pemohon suaka yang banyak membuat permohonan ke Hongaria karena letak geografis negara Hongaria sebab negara tersebut merupakan pintu gerbang menuju Eropa Tengah dan Barat daripada berkaitan dengan sikap negara itu terhadap imigran. Data diatas juga menjelaskan

bahwa lebih dari sepuluh pencari suaka, pada kenyataannya terdapat lima negara tertinggi pencari suaka yaitu Suriah, Kosovo, Afghanistan, Albania dan Irak yang membuat Viktor Orban melakukan penolakan pada kebijakan relokasi kuota pengungsi dengan melihat permohonan suaka yang banyak (Desilver 2015).

Penolakan yang dilakukan oleh Viktor Orban terhadap kebijakan Uni Eropa dibentuk dalam suatu kebijakan yang disebut sebagai Kebijakan Anti-imigran yang mana kebijakan tersebut dibuat atas dasar untuk menjaga keamanan negara, identitas nasional, ekonomi dan opini masyarakat sosial Hongaria. Selain itu, partai Fidesz diketuai oleh Viktor Orban merupakan partai paling berpengaruh dan kuat didalam perpolitikan Hongaria, partai tersebut juga berkontribusi terhadap pembuatan kebijakan anti-imigran untuk menganggulangi krisis pengungsi di Hongaria. Pertimbangan Viktor Orban dalam membuat kebijakan tersebut dengan melihat kondisi dalam negaranya yang datang dari berbagai faktor baik itu faktor internal maupun faktor eksternal (Sunardi 2020).

Viktor Orban dengan tegas menolak adanya relokasi pengungsi oleh EU ke Hongaria sebab semakin banyaknya pengungsi akan mengancam keamanan dan stabilitas negara. Perdana Menteri Viktor Orban dalam beberapa kesempatan yang berbeda salah satunya di pertemuan pers Brussels tanggal 3 September 2015 disini Orban menyatakan bahwa *“we have a right to decide that we do not want a large number of Muslim people in our country, We do not like the consequences,. Please don't come... It's risky to come. We can't guarantee that you will be accepted..”* (Aljazeera 2015).

Pernyataan Viktor Orban tersebut menunjukkan bahwa Hongaria tidak akan menerima pengungsi dari Timur Tengah yang menyebabkan krisis terutama bagi

pengungsi Muslim Suriah mayoritas masyarakat nya Muslim dan wilayah nya merupakan wilayah konflik dan terkait kasus terorisme di Eropa dalam hal ini Viktor Orban sangat waspada terhadap pengungsi apalagi dengan adanya relokasi pengungsi. Bentuk penolakan oleh Viktor Orban terhadap krisis pengungsi dilakukan dengan membangun pembatasan pagar kawat besi dan hukuman bagi imigran ilegal yang mencoba memasuki wilayah Hongaria pada kebijakan tersebut.

Setelah mengetahui adanya relokasi kuota pengungsi dari kebijakan UE dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Hongaria Viktor Orban sejak awal 2015 yang sudah bertentangan dengan kebijakan UE terdapat alasan lain pemerintah Hongaria selain faktor ancaman bagi negara dari sistem relokasi kuota pengungsi oleh UE yang membuat Hongaria tidak menyetujui peraturan tersebut ialah karena pemohon suaka yang meningkat dan ketetapan jumlah kuota pengungsi yang banyak untuk negara Hongaria. Terkait hal ini Hongaria mendapatkan keharusan untuk menerima dan merelokasi sekitar 1.294 pengungsi dengan pembagian 988 pengungsi dari wilayah Yunani dan 306 pengungsi dari wilayah Italia (European Union 2015).

Kebijakan anti-imigran tahun 2015 yang dibuat oleh Viktor Orban dapat dilihat melalui implementasi kebijakannya terhadap para pengungsi dan cara negara Hongaria menanggulangi krisis yang terjadi dalam negaranya. Menurut Perdana Menteri Orban, krisis pengungsi sangat berdampak buruk bagi Hongaria sebab kondisi Hongaria yang tidak memungkinkan untuk menerima banyak pengungsi dari jumlah kuota pengungsi ke Hongaria yang semakin meningkat. Dalam hal ini, pada bab selanjutnya akan menjelaskan lebih rinci terkait sikap Hongaria

menghadapi krisis pengungsi melalui kebijakan anti-imigran yang dibuat oleh Viktor Orban.

### **2.3 Terbentuknya Kebijakan Anti-imigran di Hongaria Tahun 2015**

Dibentuknya kebijakan anti-imigran ini berawal dari Perdana Menteri Orban yang sebelumnya merasakan kekhawatiran atas arus kedatangan imigran ke Hongaria dengan mengatakan bahwa imigran itu dapat membawa ancaman nasional Hongaria terutama dalam konteks ancaman terorisme. Pada tanggal 20 Februari 2015, Partai Fidesz dan Majelis Nasional Hongaria mengadakan rapat yang membahas terkait krisis pengungsi yang semakin meningkat dengan tema “Hongaria tidak membutuhkan adanya imigran ekonomi”. Disebut sebagai imigran ekonomi karena Perdana Menteri Orban mengatakan kalau imigran yang datang ke Hongaria hanya berpura-pura mencari kebutuhan ekonomi dan akan mengancam keamanan nasional Hongaria (Szabolcs 2015).

Dalam rapat tersebut, anggota parlemen Partai Fidesz memberikan argumen-argumen terkait pengungsi yang berdatangan dengan mengatakan bahwa pengungsi itu akan menyebabkan kekacauan, menyebarkan penyakit, telah mengeksploitasi hukum internasional sebab banyak dari pengungsi termasuk dalam imigran tanpa dokumen atau imigran ilegal dan pengungsi dapat memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya (Szabolcs 2015). Dapat diketahui posisi pemerintahan Viktor Orban memiliki otoritas penuh terhadap pengambilan keputusan serta menetapkan ideologi ataupun gagasan didalam sistem pemerintahan Hongaria yaitu parlementer (Rachmat 2021).

Dari argumen-argumen tersebut Perdana Menteri Orban mengambil langkah dengan membuat “Konsultasi Nasional dalam Isu Migrasi dan Terorisme” pada April 2015. Isi dari konsultasi ini yaitu Perdana Menteri Orban membuat kuesioner untuk masyarakat Hongaria yang berusia 18 tahun keatas dengan 12 pertanyaan. Tujuan dibuatnya kuesioner ini untuk menciptakan peraturan migrasi yang lebih baik dan ada sekitar 8 juta kuesioner yang dikirim ke seluruh masyarakat Hongaria berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berfokus bahwa imigran sebagai ancaman terorisme dan hasil survei menunjukkan hanya 13% populasi yang menganggap imigran sebagai masalah di Hongaria (Refugees 2016, 5).

Hongaria melakukan amandemen undang-undang suakanya (*Asylum LXXX of 2007*) yang mana ini berkaitan dengan argumen-argumen dari kebijakan anti-imigran oleh Perdana Menteri Orban. Perubahan amandemen menimbulkan beberapa permasalahan dalam penerimaan pengungsi atau pencari suaka yang mana tujuannya dilakukan nya amandemen suaka ini lebih mudah untuk menolak pencari suaka di Hongaria.

Terdapat perubahan yang menjadi permasalahan dalam penerimaan pengungsi di Hongaria yaitu pada bagian Aturan Memastikan Pemeliharaan Ketertiban di Perbatasan Negara pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “garis perbatasan luar berjarak 60 meter dari wilayah Hongaria merupakan fasilitas perlindungan ketertiban perbatasan negara digunakan untuk keperluan kinerja pertahanan negara, keamanan nasional, penjaga perbatasan, prosedur imigrasi dan suaka” (A. Act 2007). Pemerintah Hongaria melakukan amandemen dari UU tersebut melalui undang-undang suaka 2015 CXL pada pasal 53 ayat (3) yang berbunyi “petugas polisi dapat menahan imigran secara tidak sah dari garis perbatasan dan dikawal

oleh polisi dan imigran yang melewati pagar perbatasan, merusak pagar perbatasan dikenakan proses pidana” (2. C. Act 2015).

Implementasi kebijakan anti-imigran dari UU yang diubah yaitu pemerintah Hongaria membuat zona transit yang prosedur perbatasannya membatasi hak pencari suaka dan juga Hungarian Helsinki Committee merespon bahwa zona transit dapat menjadi penjara bagi pengungsi dan pencari suaka yang mana ribuan pengungsi dan pencari suaka akan ditahan dalam kurun waktu empat minggu. Hungarian Helsinki Committee menghitung ada sekitar 10.000 pengungsi ditahi waktu untuk diproses ke penjara. Sehingga Hongaria juga melakukan hukuman pidana bagi yang melewati pagar perbatasan dan merusak pagar perbatasan dengan Serbia untuk mengatasi arus imigran (Committee, Unprecedented Human Rights Violations in Hungary 2015, 2).

Selain itu, Perdana Menteri Orban bersama anggota parlemen Partai Fidesz juga menetapkan adanya krisis migrasi masa (*migration mass crisis*) yaitu pemerintah Hongaria mengatakan bahwa keadaan pengungsi secara langsung akan membahayakan keamanan pemukiman baik itu dari bentuk kerusuhan maupun tindak kekerasan yang dilakukan di pemukiman sehingga Perdana Menteri Orban menempatkan polisi dan militer untuk ditugaskan di daerah pemukiman dengan tujuan keamanan atau militeristik (Committee, Unprecedented Human Rights Violations in Hungary 2015).

Dari semua kebijakan yang telah disebutkan dalam amandemen baru tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Hongaria Viktor Orban secara jelas mengatakan tidak akan memberikan perlindungan kemanusiaan kepada pengungsi dan secara *de facto* pemerintah Hongaria menyatakan keluar dari *Common*

*European Asylum System (CEAS)* yaitu sebuah kebijakan pembagian kuota pengungsi kepada negara-negara anggota UE yang dibuat oleh Uni Eropa.

Dapat diketahui juga komunikasi antar pemerintah Hongaria dengan masyarakatnya memiliki sudut pandang yang sama terhadap pengungsi yang datang ke wilayah Hongaria yaitu Perdana Menteri Orban dan masyarakatnya melabeli pengungsi Timur Tengah dan pengungsi lainnya yang melarikan diri dari konflik di negaranya dengan sebutan imigran ekonomi secara ilegal melewati perbatasan yang menyamar menjadi pengungsi untuk mencari kebutuhan ekonomi dan pekerjaan yang mana dalam hal ini Hongaria mengatakan tidak punya hak untuk melindungi para pengungsi yang datang (Attila Juhász 2015, 25).

Dengan hal ini, wakil ketua Partai Fidesz, Lajos Kósa bersama Badan Perlementer Partai Fidesz yang telah mengajukan beberapa usaha diatas dengan harapan dapat dilakukan oleh badan legislatif untuk memperketat hukum pengungsi dengan memberhentikan imigran ilegal atau imigran ekonomi. Pada akhirnya kebijakan Anti-Imigran ini mulai di implementasikan oleh Perdana Menteri Orban pada tanggal 15 September 2015, yang mana kebijakan anti-imigran telah masuk sebagai faktor utama terjadinya perubahan amandemen suaka Hongaria yang telah dijelaskan sebelumnya (Meszaros 2016).

Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, Perdana Menteri Orban melakukan upaya-upaya untuk mengatasi arus pengungsi yang semakin meningkat di Hongaria. Melakukan survei melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Hongaria dengan pertanyaan yang berfokus pada imigran sebagai ancaman dan hasil survei menunjukkan terdapat 65% populasi yang setuju bahwa imigran adalah ancaman bagi Hongaria yang mana hasil survei tersebut meningkat dari hasil survei

pada Mei 2015 hingga melakukan pembangunan pagar kawat berduri (Attila Juhász 2015, 17).

### 2.3.1 Implementasi Kebijakan Anti-imgran di Hongaria Tahun 2015-2018

Sebelumnya telah dijelaskan dibentuknya kebijakan anti-imigran sebagai upaya pemerintahan Viktor Orban melakukan penolakan terhadap imigran. Dapat diketahui melalui jumlah permohonan suaka di Hongaria yang berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 2.3.1 Jumlah Permohonan Suaka Di Hongaria Tahun 2015-2018**

(Goździak 2019)

2015	2016	2017	2018
177.135	29.432	3.397	671

Berdasarkan data diatas, pencari suaka di Hongaria dari tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan akan tetapi tidak menghambat PM Viktor Orban membuat sebuah kebijakan migrasi untuk mengatur arus pengungsi yang ada di Hongaria. Pada penerapan kebijakan anti-imigran di dominasi oleh partai sayap kanan Fidesz dan Perdana Menteri Viktor Orban, pihak tersebut hanya mengendalikan militer dan polisi dalam mengontrol perbatasan arus pengungsi dan pemukiman yang dimaksud bukan berasal dari pemerintah Hongaria melainkan pemukiman yang dibangun sendiri oleh pengungsi (Descamps 2015).

Selain itu, pemerintah secara progresif mengontrol dan mengawasi media, LSM, serta organisasi masyarakat sipil terhadap pemberitaan kasus krisis pengungsi. Perdana Menteri Viktor Orban mengatakan bahwa hanya Kementrian

Pertahanan dari Parlemen Partai Fidesz yang berhak mengontrol dan memantau daerah perbatasan arus pengungsi (Descamps 2015).

Berdasarkan implementasi kebijakan anti-imigran oleh Perdana Menteri Orban dapat diketahui bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak pada fisik. Juli 2016, di zona transit ada sekitar 100 imigran yang mencoba melewati perbatasan pada akhirnya mereka ditahan dan di penjara karena telah melanggar aturan kebijakan anti-imigran oleh Perdana Menteri Orban. Di zona transit tidak menjamin kesehatan para imigran yang mana banyak dari mereka tidak mendapat akses kesehatan dari dokter umum yang ditempatkan seperti pemeriksaan atau perawatan lebih lanjut (Kekesi 2017, 7).

Menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), pusat penahanan diperbatasan telah melakukan kekerasan verbal dan fisik dari penjaga pusat penahanan terhadap para imigran terutama ketika para imigran ingin berpergian ke bank ataupun kantor pos tangan mereka dalam keadaan diborgol (UNHCR 2016, 7). Adapun data yang diambil dari Hungarian Helsinki Committee pada tahun 2017, ada sekitar 436 pencari suaka ditahan termasuk didalamnya terdapat 226 anak-anak dibawah umur tanpa pendamping yang berusia 14 tahun dan 18 tahun.

Tidak ada akses untuk perawatan khusus untuk anak yang memadai dan pendidikan yang layak begitu pula dengan ibu hamil yang harus dibawa untuk pemeriksaan kesehatan bayi dan dikawal oleh 2 atau 3 orang polisi yang mengawasi ibu hamil tersebut akan tetapi tidak ada interpretasi yang diberikan selama pemeriksaan medis sehingga komunikasi dan membangun kepercayaan antar dokter dengan pasien menjadi sangat sulit (Committee 2017, 6-10). Di tahun 2018,

kekerasan berkelanjutan terus dilakukan oleh polisi Hongaria diperbatasan Hongaria-Serbia terhadap para imigran dengan memukuli mereka secara brutal, membakar barang-barang pribadi mereka, tidak mendapat makanan bahkan jika mereka ingin makan maka mereka harus membayar tiga kali lipat dari harga makanan tersebut karena mereka pengungsi, hanya diberikan minum dan penggunaan genset selama seminggu sekali (Hardigan 2022).

Pada September 2015-Juli 2016 ada sekitar 2.800 laporan pidana dari tindakan imigran yang melintasi pagar perbatasan dan ada tujuh orang yang ditahan hingga mereka terpisah dari anak-anaknya selama masa tahanan. Pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan terhadap anak-anak tanpa pendamping dan perempuan dewasa juga dilakukan oleh polisi Hongaria diperbatasan dan dalam tahanan. Tindakan kekerasan seksual sudah terjadi sejak awal adanya sistem penahanan ditetapkan kepada imigran.

Tahun 2017, terdapat 56 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi Hongaria dan tahun 2018 adapun kasus yang mengacu pada ketersediaan makanan yang sedikit, tidak memiliki tenda untuk bertempat tinggal dan tidak ada perlengkapan bayi diperbatasan (AIDA, Country Report: Hungary 2019, 20). Dampak fisik dan psikologis pun terjadi pada imigran selama masa tahanan, melakukan pemukulan, penyemprotan merica, tidak memberikan akses makanan, kesehatan, dan *camp* ke para imigran sehingga menimbulkan sakit pada bagian tubuh, kelaparan, dan dehidrasi (Committee, Refugees Stranded at the Serbian-Hungarian Border 2016).

Selain itu, para imigran juga didiagnosis dengan gangguan stres pasca-trauma terdapat sekitar 24 orang merupakan bagian dari keluarga dan anak-anak

(Jovana 2017). Alasan dibentuknya kebijakan ini yang tampak nyata oleh masyarakat Hongaria ialah untuk melindungi keamanan ekonomi karena imigran dianggap akan mengambil pekerjaan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengganggu pergerakan ekonomi di Hongaria (Pradana 2018).

Adapun alasan lain pemerintahan Viktor Orban membuat kebijakan ini yang mana alasan ini merupakan alasan tersembunyi atau disengaja oleh Pemerintahan Viktor Orban yaitu keamanan identitas nasional. Mayoritas masyarakat Hongaria penganut agama Kristen dan imigran yang datang dari Timur Tengah mayoritas muslim (Nation 2015). PM Viktor Orban melakukan xenophobia terhadap imigran muslim ke masyarakat Hongaria dan xenophobia ini menimbulkan diskriminasi yang terjadi pada para imigran muslim yang berada di pagar perbatasan (Nation 2015). Untuk melihat bagaimana kebijakan anti-imigran ini dianggap sebagai kekerasan struktural maka dapat dimulai dengan mengetahui pengaruhnya terhadap korban.

## **BAB III**

### **ANALISIS KEKERASAN STRUKTURAL PADA KEBIJAKAN**

#### **ANTI-IMIGRAN DI HONGARIA TAHUN 2015-2018**

Sejarah awal terjadinya kasus krisis pengungsi yang dialami oleh negara Hongaria sejak tahun 2015 telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan isu tersebut menimbulkan terbentuknya kebijakan Anti-Imigran di Hongaria. Kebijakan anti-imigran yang dibuat oleh Viktor Orban merupakan salah satu kebijakan dengan tujuannya untuk mengurangi atau menanggulangi jumlah imigran ilegal yang memasuki negara Hongaria. Kebijakan ini mendapat sorotan internasional dan negara-negara di Eropa karena terdapat pelanggaran hak asasi manusia dan menempatkan imigran diperbatasan Hongaria-Serbia ke dalam keadaan yang rentan. Pada bab ini, menggunakan konsep dari Johan Galtung yaitu Kekerasan Struktural sebagai analisis terhadap kasus yang diangkat dengan mencoba membuktikan kekerasan struktural dari kebijakan Anti-Imigran Hongaria melalui cara penerapannya serta alasan mengapa kebijakan ini dilakukan Hongaria.

#### **3.1 Pemerintahan Viktor Orban sebagai Subjek Dalam Kekerasan Struktural**

Kebijakan anti-imigran oleh Perdana Menteri Viktor Orban dapat dilihat melalui kaca mata Kekerasan Struktural oleh Johan Galtung dengan mengamati subjek, objek dan tindakannya (Galtung 1969, 169). Terkait subjek, Galtung menjelaskan dalam jurnalnya bahwa yang berkaitan dengan subjek ialah individu atau secara langsung yang melakukan tindak kekerasan dalam sebuah struktur

sehingga dalam hal ini subjek memiliki posisi lebih tinggi daripada objek secara kedudukan struktur (Galtung 1969, 170). Subjek dalam kebijakan anti-imigran yaitu Perdana Menteri Viktor Orban bersama partai Fidesz yang merupakan partai sayap kanan di Hongaria dan diketuai oleh Viktor Orban. Posisi hierarki pemerintahan Viktor Orban terlihat dari posisi Hongaria sebagai suatu negara yang memiliki otoritas penuh dalam pembuatan kebijakan (Rachmat 2021).

Pemerintahan Viktor Orban memiliki otoritas penuh terhadap pembuatan kebijakan di Hongaria dapat dilegitimasi sebagai subjek dari tindak kekerasan struktural yang kemudian dari konsep ini akan menghasilkan kerangka kerja. Otoritas penuh dapat dilihat melalui posisi partai politik PM Viktor Orban yaitu partai Fidesz sebagai partai yang menguasai mayoritas kursi di parlemen yang memiliki kuasa untuk membentuk pemerintahan sesuai dengan ideologi atau gagasan yang dimiliki oleh partai penguasa (Rachmat 2021). Pemerintahan Viktor Orban menjadi instrumen yang menciptakan politik illiberal dengan mengangkat kasus dari kondisi krisis pengungsi di Hongaria yang menentang keberadaan kelompok minoritas dan berusaha menyingkirkan berbagai hal yang mengancam eksistensi mereka (Rachmat 2021).

Kekuasaan pemerintahan Viktor Orban di Hongaria dapat diketahui karena sistem pemerintahan Hongaria menggunakan sistem parlementer. Sistem tersebut pemerintah menjadi lembaga pelaksana segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Parlemen, dimana Perdana Menteri memiliki wewenang mengeluarkan atau menetapkan suatu keputusan dan keberadaan mayoritas partai politik di Hongaria memiliki otoritas penuh dalam membuat kebijakan politik (Government 2011). Melakukan penolakan relokasi pengungsi oleh Hongaria dengan membuat

kebijakan anti-imigran dapat memperlihatkan bahwa posisi pemerintahan Viktor Orban sangat berpengaruh di Hongaria dengan menjaga keamanan negara.

Galtung mengatakan bahwa negara memiliki otoritas penuh sehingga secara tatanan struktur memiliki kedudukan paling tinggi dan kebijakan ini dapat membuat objek menjadi lebih rendah daripada subjek yang dimaksud oleh Galtung dalam struktur tersebut (Galtung 1969, 178). Kebijakan anti-imigran yang dibuat pada tanggal 15 September 2015 oleh Perdana Menteri Viktor Orban merupakan sebuah kerangka kerja yang dimaksud dalam konsep Kekerasan Struktural yang memiliki pengaruh atau kekuatan untuk mengatur, dan pemerintahan Viktor Orban disebut sebagai subjek dari konsep kekerasan struktural yang digunakan.

### **3.2 Para Imigran sebagai Objek Kekerasan Struktural dari Kebijakan Anti-imigran Hongaria**

Pada objek Galtung mengatakan bahwa objek dalam konsep kekerasan struktural yaitu korban individu atau sekelompok masyarakat yang merasakan kekerasan struktural yang terjadi dari sebuah sistem atau struktur. Objek tidak harus mengalami tindak kekerasan struktural secara langsung dan kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak ada objek yang mengalami luka secara fisik maupun psikologis dan dapat dikategorikan bahwa terluka hingga mendapat ancaman sudah termasuk dalam tindak kekerasan struktural (Galtung 1969, 170).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas berdasarkan dari kebijakan anti-imigran tersebut, yang menjadi objek dari kebijakan ini ialah para imigran yang telah mencoba memasuki pagar perbatasan Hongaria-Serbia dan mereka yang mengalami penahanan dipenjara hingga terpisahnya mereka dengan anak-anak,

tidak mendapat akses untuk makan dan tidak mendapat akses untuk kesehatan. Tindakan tersebut sudah termasuk pada tindak kekerasan struktural yang dilakukan pemerintahan Viktor Orban (Gall 2016). Tindak kekerasan yang dirasakan oleh objek akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya yaitu terkait kekerasan secara *latent* dan kekerasan secara *manifest* terhadap objek.

### **3.3 Kekerasan Secara Latent**

Galtung mengatakan terdapat sebuah aksi dan tindakan dalam kekerasan struktural yang mana kekerasan dapat ditemukan jika adanya ketidakseimbangan atau perbedaan antara realisasi aktual dan potensi oleh subjek yang melakukan kekerasan. Realisasi aktual merupakan kemampuan subjek dalam mengatur tindakannya menghadapi sebuah fenomena, sedangkan potensial ialah sebuah kekerasan yang memungkinkan dapat terjadi dan akan dirasakan. Dalam hal ini, kekerasan akan muncul ketika tingkat potensi lebih tinggi daripada tingkat realisasi aktual yang mana dimaksud dengan faktor yang menjadi awal mula kekerasan terjadi lebih besar tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan subjek dalam mengatur tindakannya. Berkaitan dengan ini, terdapat dua tingkat kekerasan yaitu kekerasan *latent* dan *manifest*.

*Latent* merupakan suatu situasi yang tidak menunjukkan adanya kekerasan akan tetapi sangat memungkinkan dengan munculnya kekerasan. Dapat dilihat melalui pagar perbatasan ini telah terjadinya pengabaian terhadap akses makanan, kesehatan, dan *camp* sebagai tempat tinggal mereka. Sejak tahun 2015, akses makanan, kesehatan dan *camp* tidak dapat dirasakan oleh imigran diperbatasan yang mana dalam hal ini pemerintah Hongaria sadar terhadap tidak adanya akses tersebut akan tetapi pengabaian tetap terjadi (HRW 2018).

Di tahun 2018 imigran masih juga tidak mendapatkan akses tersebut yang membuat imigran melakukan tindak melanggar aturan yang ditetapkan Hongaria yaitu dengan melewati perbatasan untuk mendapatkan akses secara ilegal akan tetapi sistem penahanan telah ditetapkan, saat itu juga mereka yang melewati perbatasan ditahan. Selama penahanan, tidak ada yang diberi akses untuk makan, minum, bahkan kesehatan juga diabaikan (HRW 2018). Alasan pembiaran akses ini karena pemerintah Hongaria ingin imigran yang melakukan pencarian suaka mundur dari zona transit atau perbatasan tersebut dan pergi ke negara lain.

Pengabaian terhadap hak asasi imigran untuk mendapatkan akses makanan, kesehatan serta *camp* ini termasuk pada bentuk kekerasan struktural secara *latent* sebab situasi pengabaian seperti ini tidak menunjukkan kekerasan secara nyata akan tetapi karena adanya pengabaian akses tersebut telah menimbulkan adanya kekerasan struktural terhadap imigran yang tidak mendapatkan hak akses nya. Disebut sebagai kekerasan struktural karena melalui implementasi pengabaian akses ini berada dalam struktur kebijakan anti-imigran Hongaria.

### **3.4 Kekerasan Secara *Manifest***

Sedangkan *manifest* merupakan suatu situasi dengan kekerasan yang dapat terlihat dan selama kekerasan tersebut akan terlihat secara nyata serta disadari dengan sebuah tindak kekerasan (Galtung 1969, 172). Pada kasus kebijakan anti-imigran aksi dan tindakan ini dapat juga dilihat pada kekerasan dalam bentuk *manifest*. Oleh PM Viktor Orban yang tidak menjalankan realisasi aktualnya sebagaimana seharusnya melalui pagar perbatasan Hongaria-Serbia yang melakukan pengabaian akses makanan, kesehatan dan *camp* terhadap imigran. Selain itu, dapat diketahui pula permohonan suaka di Hongaria tahun 2015 menjadi

faktor dibangunnya pagar perbatasan Hongaria-Serbia melalui kerjasama yang telah dibentuk kedua belah pihak negara.

Perdana Menteri Viktor Orban bersama Parlemen Hongaria mengerahkan polisi dan militer untuk mengontrol dan memantau pengungsi di perbatasan Hungaria-Serbia dengan mempersenjatai mereka menggunakan peluru karet, granat gas air mata dan alat piroteknik sejenis kembang api. Parlemen Hongaria mengeluarkan resolusi dengan menyerukan semua tindakan ataupun persenjataan yang diberikan dapat mempertahankan perbatasan Hongaria (Hongaria 2015).

Penggunaan senjata api sebagai pertahanan sangat awam bagi militer dan polisi akan tetapi dengan dipersenjatai seperti itu dapat membuka jalan terjadinya tindakan kekerasan dan tindakan pembunuhan kepada pengungsi yang dapat saja terjadi. Tindakan kekerasan ini terjadi ketika polisi menanggapi pengungsi yang protes agar gerbang atau pagar perbatasan dibuka dan terkait hal ini polisi melakukan tindak kekerasan terhadap pengungsi dengan menyemprotkan gas air mata, semprotan merica dan meriam air (Bruno Nota 2015).

Tidak hanya itu, polisi juga melakukan pemisahan anak-anak dengan orang tua nya bagi mereka yang melakukan protes agar dibuka nya pagar perbatasan. Tidak banyak yang melakukan protes hanya beberapa orang, mereka berlari menyelamatkan diri tetapi wanita dan anak-anak tergeletak ditanah tidak dapat melarikan diri dari serangan polisi sehingga mereka ditangkap dan polisi menangkap sekitar 9 orang termasuk 4 anak-anak dari keluarga mereka yang akhirnya mereka terpisah dari keluarganya (International 2015). Pada tahun 2016 hingga 2018 juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi dan militer dapat diketahui bahwa banyak pengungsi diperbatasan menjadi korban penghinaan,

perampokan dan kekerasan fisik yang parah dan tidak dapat dibenarkan ketika mencoba masuk ke Hongaria (Kekesi 2017).

Selama jangka waktu kebijakan anti-imigran baik secara resmi maupun tidak resmi telah terdapat pihak-pihak yang terdampak yaitu objek dari kebijakan anti-imigran tersebut yang kemudian menjadi korban dari kekerasan struktural. Dalam kasus ini, objek dari kekerasan struktural tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu para imigran dan anak-anak imigran yang menjadi korban dari implementasi kebijakan anti-imigran. Dapat diketahui bahwa Perdana Menteri Orban beserta pemerintahannya telah melanggar hak asasi manusia terhadap para imigran yang berada diperbatasan sehingga menimbulkan dampak fisik dan psikologis pada korban yaitu para imigran diperbatasan Hongaria-Serbia. Kasus tersebut membuktikan bahwa kekerasan dilakukan secara nyata dan implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan dalam kekerasan struktural yang bersifat *manifest* dan dapat dirasakan secara nyata oleh para imigran di perbatasan.

### **3.5 Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikologis Terhadap Imigran**

Adapun pengaruh kekerasan dari penerapan kebijakan anti-imigran yang terbagi menjadi dua kekerasan yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis terhadap objek yang menjadi korban dari kekerasan struktural. Galtung menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang terjadi hingga membuat terluka dan korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya tindakan ini akan berdampak pada ruang gerak manusia atau korban. Kondisi seseorang menjadi kesulitan atau bahkan mereka akan kesulitan mendapat akses-akses kebutuhan manusia akibat dari ruang gerak nya yang terbatas (Galtung 1969, 169). Selain itu,

dampak yang ditimbulkan dari kekerasan fisik dapat melalui alat-alat seperti persenjataan maupun tidak melalui alat-alat seperti menggunakan bagian tubuh (Galtung 1969, 174).

Sejak 2015 ditetapkannya kebijakan anti-imigran ini dapat diketahui, beberapa tindak kekerasan struktural terhadap para imigran yang dilakukan oleh pemerintah Hongaria tersebut telah menimbulkan dampak fisik yang dirasakan oleh imigran diperbatasan seperti penahanan yang menimbulkan sakit pada bagian tubuh akibat pemukulan didalam penjara, semprotan merica membuat mata perih, tidak mendapat akses kesehatan dan makanan yang menimbulkan kelaparan, kurang gizi, dehidrasi, dan kelelahan fisik (Committee 2016). Serta pada anak-anak juga mengalami penahanan dipenjara hingga mereka terpisah dengan orangtuanya. (AIDA, Country Report: Hungary 2019).

Dari kekerasan tersebut mengakibatkan dampak pada fisik para imigran sehingga kekerasan fisik ini juga dapat menjadi faktor munculnya dampak psikologis pada imigran. Dampak psikologis, Galtung menjelaskan bahwa kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang dapat mengganggu jiwa seseorang dan dapat berpengaruh dalam kehidupan individu yang mana dampak psikologis sulit untuk diidentifikasi secara jelas sebab kekerasan psikologis ini dapat menyerang jiwa individu dan mengubah perilaku mereka. Bentuk-bentuk yang mengancam kesehatan psikologis akan mengancam kesehatan mental individu (Galtung 1969, 169).

Hal ini terjadi pada objek kebijakan anti-imigran, yaitu sejak tahun 2015 para imigran yang dipenjara yang harus terpisah dari anak-anaknya sehingga anak-anak mengalami kecemasan dan dinamika emosi yang tidak stabil. Melalui tindakan

penyemprotan merica ke para imigran hingga pemukulan telah membuat para imigran mengalami traumatis ketika mereka berada dipagar perbatasan berjumpa dengan polisi Hongaria dan ketika mereka ingin mencoba melewati perbatasan itu kembali. Selama masa tahanan, para imigran didiagnosis dengan gangguan stres pasca-trauma, mereka adalah bagian dari keluarga dan anak-anak (Jovana 2017). Tidak hanya trauma terhadap aksi pemukulan yang dirasakan adapun tindak lain yang dilakukan polisi Hongaria yaitu dengan merampas barang-barang pribadi mereka termasuk ponsel dan obat-obatan mereka yang mana ini menambah kerentanan stres, perasaan putus asa dan ketidakberdayaan akibat perampasan barang pribadi mereka (AIDA 2015).

Selain itu, menurut data dari *Asylum Information Database* (AIDA) dampak psikologis lainnya yang terjadi pada imigran akibat dari penerapan kebijakan anti-imigran ini yaitu penahanan yang dilakukan oleh polisi yang menjaga penjara telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan perempuan pada tahun 2017 terdapat 56 kasus pelecehan seksual oleh polisi pertahanan diperbatasan Hongaria-Serbia (AIDA, Country Report: Hungary 2019, 20). Kasus pelecehan seksual ini telah menimbulkan traumatis pada psikis imigran anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dan menimbulkan penyembuhan yang lebih lama karena telah mengganggu kesehatan mental korban (AIDA, Country Report: Hungary 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan dari penerapan kebijakan anti-imigran oleh pemerintahan Viktor Orban ini menimbulkan dampak fisik dan dampak psikologis dari bentuk tindakan kekerasan struktural yang telah dijelaskan oleh Galtung. Sesuai dengan poin-poin yang dikemukakan oleh Galtung terkait tindakan yang dilakukan hingga menimbulkan dampak fisik dan dampak

psikologis pada para imigran diperbatasan Hongaria-Serbia. Pada sub-bab selanjutnya, Galtung juga menyatakan tentang adanya motivasi atau dorongan dari terjadi kekerasan struktural yang dianggap sebagai dorongan dalam mengambil suatu tindakan atau pendekatan didalamnya. Penjelasan Galtung akan menjawab mengapa pemerintahan Viktor Orban melalui kebijakan anti-imigran ini dapat menyebabkan kekerasan struktural dalam penerapannya.

### **3.6 Motivasi *intended* dan *unintended* Kebijakan Anti-Imigran di Hongaria**

Penerapan kebijakan anti-imigran merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Viktor Orban dalam upayanya untuk menanggulangi banyaknya permohonan pencari suaka ke negara Hongaria dan mencegah datangnya imigran ilegal sehingga mereka hanya bisa berada didaerah perbatasan Hongaria-Serbia, meskipun kebijakan ini sangat kontroversial bagi UE akan tetapi kebijakan ini mendapat dukungan dari masyarakat Hongaria dan dari dukungan tersebut telah menurunkan jumlah imigran yang masuk ke Hongaria secara signifikan. Hongaria tanpa ragu menerapkan kebijakan anti-imigran dengan komitmen menahan para imigran yang mencoba melewati pagar perbatasan (Setiabudi 2021).

Hongaria berfokus untuk mencegah bertambahnya jumlah pemohon suaka dan imigran yang masuk karena hal tersebut akan mengancam sektor domestik Hongaria yaitu keamanan ekonomi dan keamanan Hongaria. Kebijakan anti-imigran ini dibuat untuk mengurangi jumlah imigran ataupun permohonan suaka dan membuat sebuah sistem kebijakan imigrasi ini tujuan lainnya untuk melindungi keamanan ekonomi dan keamanan identitas nasional Hongaria (Pradana 2018).

Selain menjelaskan adanya subjek, objek serta tindakan pada kekerasan struktural. Galtung juga menjelaskan adanya dua hal, yaitu motivasi atau dorongan dan pendekatan yang dilakukan aktor dalam mengambil tindakan. Motivasi atau dorongan dijelaskan oleh Galtung, yaitu *intended* dan *unintended* (Galtung 1969, 171). *Intended* merupakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh subjek terhadap objek, sementara *unintended* merupakan kekerasan yang dilakukan secara tidak disengaja atau tindakan yang tidak ada untuk melukai objek.

Motivasi atau dorongan yang dilakukan pemerintahan Viktor Orban dalam membuat kebijakan anti-imigran ini dapat dilihat dari dua sisi secara *intended* dan *unintended*. Menurut Galtung motivasi *intended* merupakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan terdapat niat yang jelas untuk melakukan kekerasan. Melalui kebijakan anti-imigran yang dibuat oleh pemerintahan Viktor Orban faktor yang memotivasi nya untuk membuat kebijakan ini selain mengatasi arus pengungsi yang meningkat, alasan lainnya adalah untuk menjaga keamanan negara yaitu identitas nasional. Hongaria mayoritas masyarakat nya Kristen dan Perdana Menteri Viktor Orban menyatakan tidak keinginan mereka dengan adanya minoritas dengan karakteristik dan budaya yang berbeda dengan Hongaria. Minoritas yang dimaksud ialah imigran muslim yang akan mengganggu identitas nasional Hongaria dan akan mengganggu stabilitas tatanan internal budaya dan agama masyarakat Kristen di Hongaria (Nation 2015).

PM Viktor Orban dengan sengaja menimbulkan xenophobia dikalangan masyarakat Hongaria yang mana sentimen ini muncul atas kehadiran imigran muslim di Hongaria yang menjadi ancaman identitas nasional Hongaria hingga menimbulkan adanya diskriminasi terhadap imigran muslim yang mana mereka

paling banyak melakukan permohonan suaka dan menjadikan Hongaria sebagai negara tujuan untuk mencari suaka. PM Viktor Orban bersama Partai Fidesz mengatakan bahwa imigran muslim dapat menjadi imigran yang fundamentalis, penjahat dan teroris (Nation 2015).

Pemerintahan Viktor Orban juga menggambarkan imigran muslim sebagai penjajah yang ingin memaksakan budaya mereka pada masyarakat Eropa untuk mendirikan kekhalifahan islam di benua Eropa (Péter Krekó 2019). Dalam konteks ini, maka kekerasan yang ditimbulkan dari pendapat PM Viktor Orban terhadap imigran muslim digolongkan dalam kekerasan secara *intended* atau kekerasan yang dilakukan secara disengaja karena subjek telah memiliki dorongan untuk membuat kebijakan tersebut dengan adanya bentuk kekerasan (Galtung 1969, 172).

Di satu sisi, apabila hanya mengacu pada pernyataan bahwa pemerintahan Viktor Orban terkait perlindungan dari ancaman keamanan ekonomi dan keamanan di Hongaria, maka kekerasan struktural yang ditimbulkan termasuk pada bentuk *unintended* yang mana dilakukan secara tidak sengaja. Sebab alasan tersebut tidak diniatkan untuk melukai seseorang atau kelompok tertentu melainkan ini adalah konsekuensi dari kebijakan anti-imigran dengan menahan imigran tanpa terkecuali.

Dapat diketahui bahwa pemerintahan Viktor Orban mengatakan para imigran dapat mengancam ekonomi Hongaria dengan meningkatnya jumlah imigran hingga memunculkan ancaman terhadap ekonomi Hongaria seperti mereka akan mengambil lapangan pekerjaan milik masyarakat Hongaria. Sehingga rasa ketakutan pemerintahan Viktor Orban ini direalisasikan dalam sebuah kuesioner yang dibuat oleh Perdana Menteri Viktor Orban yang memperlihatkan rasa ketakutan pemerintah terhadap ancaman ekonomi yang dibawa oleh para imigran

dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan membentuk opini publik (Barna 2019). Dari alasan tersebut dapat dilihat bahwa motivasi atau dorongan dibuatnya kebijakan ini masuk dalam bentuk *unintended*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat alasan yang menjadi motivasi atau dorongan pemerintahan Viktor Orban membuat kebijakan anti-imigran sesuai dengan penjelasan oleh Galtung yaitu berkaitan dengan motivasi atau dorongan *intended* dan *unintended*. Bagian pertama, upaya PM Viktor Orban untuk melindungi Hongaria dari ancaman ekonomi dan keamanan negara namun memunculkan konsekuensi dengan menahan para imigran tanpa terkecuali, hal ini masuk pada dorongan *unintended*. Sedangkan *intended*, PM Viktor Orban sengaja mengambil kebijakan ini selain mengatasi arus pengungsi yang meningkat adapun alasan lain yaitu dengan melakukan sentimen xenophobia terhadap imigran muslim hingga menimbulkan diskriminasi terhadap imigran muslim yang mana kekerasan ini melalui alasan yang dibentuk secara disengaja untuk kepentingan politiknya (Nation 2015).

### **3.7 Pendekatan Negatif Kebijakan Anti-Imigran di Hongaria**

Pada kasus krisis pengungsi di Hongaria tahun 2015-2018 sesuai dengan dinamika kasus yang diangkat bahwa implementasi kebijakan anti-imigran tidak terlihat menggunakan pendekatan positif seperti yang telah dijelaskan oleh Galtung. Pendekatan positif merupakan suatu tindakan yang memberikan *reward* ke objek akan tetapi *reward* tersebut menjadi ancaman bagi objek. Dalam hal ini, implementasi kebijakan anti-imigran tidak menggunakan pendekatan positif karena Perdana Menteri Viktor Orban berfokus pada sanksi-sanksi atau hambatan akses

kebutuhan pokok yang dilakukan terhadap imigran. Oleh karena itu, penulis melihat pada pendekatan negatif berdasarkan dinamika kasus yang diangkat masuk kepada pendekatan negatif. Pendekatan negatif merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek ke objek untuk merespon terhadap suatu hal yang dianggap dapat merugikan sehingga mendapatkan *punishment*. Pendekatan negatif ini dapat membatasi ruang gerak dan potensi objek sehingga pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan objek (Galtung 1969, 170).

Kebijakan anti-imigran diimplementasikan berdasarkan pendekatan negatif. Galtung menjelaskan tentang pendekatan negatif yaitu tindakan membatasi sesuatu yang berpotensi sebagai ancaman atau sebuah hukuman (*punishment*) bagi objek yang telah melakukan kesalahan (Galtung 1969, 172). Pada tahun 2015, Hongaria mengalami turunnya perekonomian Hongaria karena pada tahun tersebut telah terjadinya arus imigran yang meningkat drastis dan UE membuat kebijakan tiap negara untuk memberi bantuan kemanusiaan akan tetapi Hongaria tidak setuju karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dengan kedatangan imigran yang semakin meningkat di Hongaria hingga mengancam ekonomi Hongaria (Office 2015, 3-4).

Keberadaan imigran dapat menimbulkan ancaman bagi identitas nasional dan sistem politik Hongaria, oleh karena itu PM Viktor Orban membuat kebijakan anti-imigran sebagai bentuk mengatasi keberadaan imigran diperbatasan. PM Viktor Orban menetapkan sanksi pidana terhadap imigran yang melanggar aturan di perbatasan serta sanksi ditujukan juga kepada orang-orang yang mencoba untuk membantu para imigran melewati pagar perbatasan (Sherin 2021).

Selain itu, ditujukan pula kepada imigran yang mencoba memasuki perbatasan secara ilegal tanpa izin, menghalangi atau merusak perbatasan dan

orang-orang yang membantu pendanaan terhadap para imigran maka mereka yang melakukan pelanggaran tersebut mendapat *punishment* dari Perdana Menteri Viktor Orban (Pintér 2018). Hal ini selaras dengan penjelasan Galtung terkait pendekatan negatif, bahwa pendekatan ini dilakukan untuk menghentikan potensi sesuatu yang sifatnya mengancam atau membahayakan subjek dan ini disebut sebagai bentuk dari sebuah hukuman atau *punishment* kepada objek (Galtung 1969, 172). Adanya tindak pelanggaran di perbatasan mendorong PM Viktor Orban memberikan hukuman kepada para imigran yang melanggar aturan perbatasan Hongaria-Serbia dengan melewati batas pagar yang telah dibangun.

Dari penjelasan tersebut, sesuai dengan penjelasan oleh Johan Galtung yang mana dapat diketahui melalui pendekatan negatif tersebut menimbulkan *punishment* terhadap imigran yang didasari dengan alasan imigran sebagai ancaman ekonomi dan identitas nasional Hongaria. Sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur keberadaan imigran dan dapat membatasi potensi kehadiran imigran di Hongaria hingga menimbulkan adanya *punishment* terhadap imigran. Bentuk penghalang ruang gerak dan potensi imigran selama diperbatasan telah dapat dilihat melalui implementasi kebijakan tersebut seperti penahanan, tidak mendapatkan akses makanan, kesehatan bahkan *camp* sehingga membuat imigran kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka (Hardigan 2022). Melalui upaya yang dilakukan Perdana Menteri Viktor Orban dianggap sebagai bentuk dari kekerasan struktural yang dicetuskan oleh Johan Galtung.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Melalui implementasi kebijakan anti-imigran yang dibentuk oleh PM Viktor Orban bersama Partai Fidesz yang mana kebijakan ini selaras dengan konsep kekerasan struktural oleh Johan Galtung yang digunakan untuk menganalisis kasus dalam penelitian. Di era pemerintahan Viktor Orban sejak tahun 2015 merupakan tahun yang sangat krusial akibat dari adanya arus pengungsi yang semakin meningkat terutama di Hongaria. Permohonan suaka di Hongaria juga meningkat drastis ditahun 2015 sehingga PM Viktor Orban inisiatif untuk mengatasi arus pengungsi tersebut dengan membuat kebijakan anti-imigran.

Kebijakan anti-imigran ini dianggap oleh negara lain dan organisasi internasional maupun non-internasional termasuk kebijakan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) para imigran karena penerapannya yang berdampak buruk bagi imigran. Melanggar HAM sebab penerapan kebijakan ini seperti, PM Viktor Orban membangun pagar besi kawat berduri bersama Serbia dan menempatkan polisi serta tentara dipagar perbatasan sehingga para imigran mengalami kesulitan untuk melewati pagar perbatasan tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor terjadinya tindak kekerasan dari implementasi kebijakan ini yaitu seperti penahanan, pemukulan, penyemprotan merica, terpisahnya anak-anak dari orangtuanya karena penahanan yang terjadi dan kondisi fisik maupun kondisi psikologis para imigran menjadi terganggu serta mengalami luka-luka pada tubuh dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh polisi

Hongaria. Adapun kekerasan yang ditimbulkan oleh pemerintahan Viktor Orban ini yaitu diskriminasi terhadap imigran muslim dengan menggunakan xenophobia migran muslim kepada masyarakat Hongaria yang tujuannya untuk menciptakan keamanan identitas nasional Hongaria.

PM Viktor Orban mendapat banyak dukungan dari masyarakat Hongaria melalui xenophobia yang dilakukan hingga membentuk opini publik bahwa imigran muslim itu teroris dan akan menghilangkan nilai-nilai kristen di Hongaria. Selain itu, terdapat bentuk *punishment* yang dilakukan terhadap para imigran ketika mereka melakukan pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan maka mereka mendapat hukuman seperti penahanan di pagar perbatasan.

Berdasarkan kekerasan struktural menurut Galtung, kebijakan anti-imigran pada penerapannya telah merugikan pihak imigran karena tindak kekerasan yang dilakukan dan tidak adanya akses kesehatan maupun akses makanan untuk para imigran di *camp*. Hal ini berhasil penulis buktikan bahwa kebijakan anti-imigran berkiblat pada ketakutan pemerintah terhadap ancaman ekonomi dan ancaman identitas nasional yang akan ditimbulkan oleh para imigran dengan mengingat bahwa PM Viktor Orban tidak ingin adanya multikulturalisme di Hongaria. Hal ini mengakibatkan banyak imigran yang mengalami tindak kekerasan diperbatasan dan para imigran dibatasi ruang geraknya dengan adanya kebijakan anti-imigran tersebut.

#### **4.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis berhasil menjawab rumusan masalah terkait mengapa kekerasan struktural bisa terjadi melalui kebijakan anti-

imigran yang dibuat era pemerintahan Viktor Orban di Hongaria. Namun, untuk menambah pengetahuan tentang kekerasan struktural maka penulis mengajukan beberapa hal untuk melengkapi penelitian yang sudah penulis lakukan. Berikut terdapat beberapa rekomendasi yang akan diajukan oleh penulis:

1. Kebijakan anti-imigran yang di implementasikan oleh PM Viktor Orban terdapat tindak mengabaikan kondisi para imigran yang mana ini telah termasuk dalam bentuk kekerasan struktural. Untuk pengkajian lebih lanjut secara mendalam dan teoritis mengenai sumber referensi yang masih sedikit dalam membahas dampak psikologis imigran di perbatasan akan sangat menarik jika dilakukan penelitian pada dampak psikologis yang terjadi pada para imigran di perbatasan Hongaria-Serbia.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilihat melalui batas perkembangan kebijakan anti-imigran di Hongaria yang berubah ditahun 2018 pemerintah Hongaria membentuk kebijakan baru yang disebut sebagai *Stop Soros Law*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembahasan terkait perkembangan kebijakan baru terhadap para imigran sangat menarik dilakukan dalam penelitian dimulai sejak tahun 2018 hingga kebijakan tersebut berakhir pada masa nya.

## Daftar Pustaka

- Act, 2015 CXL. 2015. *About changes to certain laws related to managements of mass migration*. 15 September. Accessed Juli 21, 2022. <https://njt.hu/m/jogszabaly/2015-140-00-00>.
- Act, Asylum. 2007. *Act LXXX of 2007 on the borders of the state*. Accessed Juni 16, 2022. <https://njt.hu/jogszabaly/2007-89-00-00>.
- AFP. 2021. *President Orban's anti-Muslim immigration policy*. 12 September. Accessed November 18, 2021. <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234025.shtml?id=11>.
- AIDA, Asylum Information Database. 2019. *Country Report: Hungary*. Hungary: AIDA.
- AIDA, Asylum Information Database. 2015. *Crossing Boundaries*. Hungary: Asylum Information Database.
- Aljazeera. 2015. *Hungarian PM: We don't want more muslims*. 4 September. Accessed April 18, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2015/9/4/hungarian-pm-we-dont-want-more-muslims>.
- Anders, Astrid Lorenz and Lisa H. 2021. *Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe*. Switzerland: Palgrave Studies in European Union Politics.
- Attila Juhász, Bulcsú Hunyadi, Edit Zgut. 2015. "Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration." *Heinrich Böll-Stiftung* 25. [https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary\\_refugees\\_asylum\\_migration.pdf](https://www.boell.de/sites/default/files/2015-focus-on-hungary_refugees_asylum_migration.pdf).
- Barany, George. 2022. *Hungary*. 7 April. Accessed April 15, 2022. <https://www.britannica.com/place/Hungary>.
- Barna, Ildikó. 2019. "Anti-Immigrant Propaganda and the Factors That Led to its Success in Hungary." In *Narratives of memory, migration, and xenophobia in the European Union and Canada*, by H. K. Hallgrímsdóttir & H. Thorson, 61-65. Canada: University of Victoria Libraries.
- Benvenuti, İlke Toygür & Bianca. 2016. *The European Response to the Refugee Crisis: Angela Merkel on the Move*. Istanbul : Istanbul Policy Center: IPC-Mercator Policy Brief.
- Bruno Nota, Meghan Keneally. 2015. *Refugee Crisis: Riot Police Use Tear Gas, Water Cannons in Hungary*. 16 September. <https://abcnews.go.com/International/riot-police-tear-gas-water-cannons-refugees-hungary/story?id=33797603> diakses pada 19 Juni 2022.
- Cahyokusumo, R. Dimas Sigit. 2021. *Mengenal Pola Segitiga Konflik & Kekerasan Johan Galtung*. 1 Januari. <https://artikula.id/dimassigitcahyo/mengenal-pola-segitiga-konflik-kekerasan-johan-galtung/>.
- Commission, European. 2015. "European Commission." *A European Agenda on Migration*. 13 Mei. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO\\_15\\_5038](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5038).
- Committee, Hungarian Helsinki. 2016. *Refugees Stranded at the Serbian-Hungarian Border*. Hungary: Hungarian Helsinki Committee.
- Committee, Hungarian Helsinki. 2017. *Two Years After: What's Left of Refugee Protection in Hungary?* Hungary: Hungarian Helsinki Committee.

- . 2015. “Unprecedented Human Rights Violations in Hungary.” 18 Desember: Hal 2.
- Dan Nolan, DN. 2015. *Refugee crisis: EU divided as Hungary attacks migrant quota as 'unrealisable and nonsense'*. September 23. <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/hungary/11884665/Refugee-crisis-EU-divided-as-Hungary-attacks-migrant-quota-as-unrealisable-and-nonsense.html>.
- Dearden, L. 2015. *Refugee crisis: As Hungary closes its borders, what are the alternatives for asylum seekers?* 16 September. Accessed November 17, 2021. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-hungary-closes-its-border-what-are-alternatives-asylum-seekers-10501626.html>.
- Dearden, Lizzie. 2015. *6 charts and a map that show where Europe's refugees are coming from - and the perilous journeys they are taking*. 02 September. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-six-charts-that-show-where-refugees-are-coming-from-where-they-are-going-and-how-they-are-getting-to-europe-10482415.html>.
- Descamps, Juliette. 2015. *Orban's Immigration Manifesto: Sweeping Away Democracy*. 22 September. <https://www.iir.cz/orban-s-anti-immigration-manifesto-sweeping-away-the-hungarian-democracy> diakses pada 18 Juni 2022.
- Desilver, Drew. 2015. *Europe's asylum seekers: Who they are, where they're going, and their chances of staying*. 30 September. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/09/30/europes-asylum-seekers-who-they-are-where-theyre-going-and-their-chances-of-staying/>.
- EASO. 2017. *About Us*. <https://www.easo.europa.eu/about-us>.
- European Union, UE. 2015. *COUNCIL DECISION (EU) 2015/1601: establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy*. Official Journal of the European Union.
- European, Commission. 2015. “Managing migration better in all aspects: A European Agenda on Migration.” *European Commission*. 13 Mei. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-4956\\_en.ht](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_en.ht).
- Eurostat. 2021. *First-time asylum applications (non-EU) in the EU Member States, 2008–2021*. May. <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921609/3-16032017-BP-EN.pdf/e5fa98bb-5d9d-4297-9168-d07c67d1c9e1?t=1489575151000>.
- Gall, Lydia. 2016. *Hungary: Migrants Abused at the Border*. 13 Juli. <https://www.hrw.org/news/2016/07/13/hungary-migrants-abused-border> diakses pada 01 Juli 2022.
- Galtung, Johan. 1969. “Violence, Peace, and Peace Research.” *Journal of Peace Research* pp.167-191.
- Gaynor, T. Holland, H., & Clayton, J. 2022. *UNHCR figures show over one million refugees and migrants reach Europe by sea in 2015, with almost 4,000 feared drowned*. 12 04. <https://www.unhcr.org/gr/en/3284-unhcr-figures-show-over-one-million-refugees-and-migrants-reach-europe-by-sea-in-2015-with-almost-4000-feared-drowned.html>.
- Góbl, András Szalai dan Gabriella. 2015. “Securitizing Migration in Contemporary Hungary.” *Central European University* pp. 16.

- Government, Hungarian. 2011. *About the Hungarian Government*. 14 Januari. Accessed Agustus 05, 2022. <https://2015-2019.kormany.hu/en/doc/the-hungarian-state/the-government-and-commissioners/the-government>.
- Goździak, Elżbieta M. 2019. *Using Fear of the “Other,” Orbán Reshapes Migration Policy in a Hungary Built on Cultural Diversity*. 10 Oktober. <https://www.migrationpolicy.org/article/orban-reshapes-migration-policy-hungary>.
- Hafez, Enes Bayraklı & Farid. 2016. *European Islamophobia Report 2015*. Istanbul: SETA, hal 229.
- Hardigan, Richard. 2022. *Migrants cope with freezing weather, violence on Hungary border*. 18 Februari. <https://www.aljazeera.com/features/2022/2/18/serbia-hungary-asylum-seekers-violent-pushback> diakses pada 28 Juni 2022.
- Hongaria, Parlemen. 2015. “Az Országgyűlés . /2015. (. . .) OGY határozat a Üzenet az Európai Unió vezetőinek.” *Hongaria Parlemen*. 22 September. <https://www.parlament.hu/irom40/05984/05984.pdf> (dalam bahasa Hongaria).
- HRW, Human Rights Watch. 2018. *Hungary: Asylum Seekers Denied Food*. 22 Agustus. <https://www.hrw.org/news/2018/08/22/hungary-asylum-seekers-denied-food> diakses pada 17 Juli 2022.
- International, Amnesty. 2015. “Hungary: Children separated from families by police amid border chaos.” 16 September.
- Ivanova, Diana. 2017. “Hungarian Security Policy and The Migrant Crisis (2015-2017).” *De Gruyter* 166.
- Jakuleviciene, Lyra. 2016. “Eu Refugee Resettlement: Key Challenges of Expanding the Practice Into New Member States.” *Baltic Journal of Law & Politics* 96-102.
- Jovana, Arsenijević et al. 2017. “A crisis of protection and safe passage: violence experienced by migrants/refugees travelling along the Western Balkan corridor to Northern Europe.” *Conflict and Health* 3-9.
- Kekesi, Mark Zoltan. 2017. “Hungary: Migration and the Policy of Closed Borders.” *Praha: Association for International Affairs* (Praha: Association for International Affairs) pp. 7.
- Lurcza, Zsuzsanna. 2018. “Actuality and Untimeliness in The Discourse on The Refugee Crisis The Case of Hungary.” *Studia UBB Philosophia* pp. 123-148.
- Meretab, Simon. 2018. *Poland, Hungary, Czech Republic and the Future of the Union*. 23 April. <https://www.southeusummit.com/europe/poland-hungary-czech-republic-future-union/> (Dilihat pada 20 Januari,2022).
- Meszaros, Edina Lilla. 2016. “A Deconstruction of the Immigration Rhetoric during the Current Refugee Crisis.” *Romania: University of Oradea* hal 20.
- Nagy, Boldizsár. 2017. “Renegade in the Club – Hungary’s Resistance to EU Efforts in the Asylum Field.” *Osteuropa Recht* (4), 413–427.
- Nation, Civic. 2015. *Xenophobic Rhetoric*. Budapest: Civic Nation.
- Office, Hungarian Central Statistical. 2015. *How will the refugee surge affect the European economy?* France: OECD.
- Parliament, European. 2015. “European Parliament.” *Legislation on Emergency Relocation of Asylum-seekers*.

- [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569018/EPRS\\_BRI%282015%29569018\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569018/EPRS_BRI%282015%29569018_EN.pdf).
- Péter Krekó, Bulcsú Hunyadi dan Patrik Szicherle. 2019. *Anti-Muslim populism in Hungary: From the margins to the mainstream*. Hungary: Brookings.
- Pintér, Sándor. 2018. *Amending certain Laws relating to Measures to Combat Illegal Immigration (So-Called "Stop Soros")*. Budapest: Ministry of Interior.
- Pradana, Aldoreza. 2018. *National Identity: Identity Politics in Hungary Refugee's Influx of 2015*. Yogyakarta: IIS BRIEF.
- Rachmat, Angga Nurdin. 2021. "Faktor Domestik Kebijakan Pemerintah Hungaria dalam Menangani Pengungsi dan Migran dari Timur Tengah Periode Tahun 2015-2019." *Jurnal Academia Praja* 33.
- Refugees, United Nations High Commission on. 2016. *Hungary As A Country Of Asylum*. Geneva: United Nations High Commission on Refugees.
- Robert, Robin Alison Remington and. 2019. "Globalization and Regime Change: Lessons from the New Russia and the New Europe." In *A New East-West Divide in Europe: Immigration as Rift between Hungary and the EU*, by Katalin Fabian, pp. 183-198. Rowman & Littlefield.
- Setiabudi, Chandra Satria. 2021. "Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Euroseptic di Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin* 24-26.
- Sherin, Virginia. 2021. "Faktor Penyebab Terbentuknya Stop Soros Law Sebagai Kebijakan Hungaria Terkait Masalah Migrasi." *Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional* 3-5.
- Sik, Endre. 2016. *The Social Aspects of The 2015 Migration Crisis in Hungary*. Budapest: Táarki Social Research Institute.
- Simonovits, B. 2020. *The Public Perception of the Migration Crisis from the Hungarian Point of View: Evidence from the Field*. Europe: IMISCOE Research Series. Springer.
- Stepper, Péter. 2016. "The Visegrad Group and the EU agenda on migration: A coalition of the unwilling? ." *Corvinus Journal of International Affairs* pp. 64.
- Sunardi, Fieqry Ifvan. 2020. "Perbandingan Kebijakan Portugal dan Hongaria Terhadap Pengungsi Timur Tengah 2015-2018." *Journal of International Relations* Volume 6, No 1, hal 66-76.
- Szabolcs, Dull. 2015. *Fidesz Launched a Hatered Campaign against Refugees*. 20 Februari.  
[https://index.hu/belfold/2015/02/20/gyulolethadjaratot\\_inditott\\_a\\_fidesz\\_a\\_menekultek\\_ellen/](https://index.hu/belfold/2015/02/20/gyulolethadjaratot_inditott_a_fidesz_a_menekultek_ellen/) diakses pada 16 Juni 2022.
- UNHCR, United Nations High Commission on Refugees. 2016. *Hungary As A Country Of Asylum*. Geneva: United Nations High Commission on Refugees.
- Uni Eropa, EU. 2015. *Council Decision (EU) 2015/1523*. United Kingdom: EU.